

**AGAMA, KEKUASAAN DAN IDENTITAS ;
STUDI UPACARA *Erau* PADA MASYARAKAT KUTAI
KARTANEGARA PROVINSI KALIMANTAN TIMUR**



**SAMSIR
E023191004**

**PROGRAM DOKTORAL ANTROPOLOGI
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS HASANUDDIN
MAKASSAR
2024**

LEMBAR PENGESAHAN DISERTASI

**AGAMA, KEKUASAAN DAN IDENTITAS : STUDI UPACARA ERAU
PADA MASYARAKAT KUTAI KARTANEGARA
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR**

Disusun dan diajukan oleh

SAMSIR

E023191004

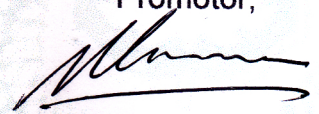
Telah dipertahankan di hadapan Panitia Ujian yang dibentuk dalam rangka
Penyelesaian Studi Program Doktor Program Studi Antropologi Fakultas Ilmu
Sosial dan Ilmu Politik Universitas Hasanuddin

Pada tanggal 07 Juli 2024

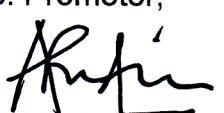
dan dinyatakan telah memenuhi syarat kelulusan

Menyetujui

Promotor,


Prof. Dr. H. Mahmud Tang, MA.
NIP 195112311984031003

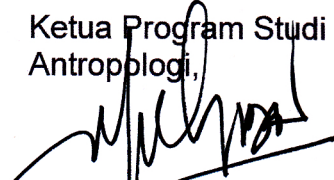
Ko. Promotor,


Prof. Dr. Ansar Arifin, MS.
NIP 196112271988111002

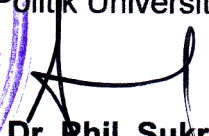
Ko. Promotor,

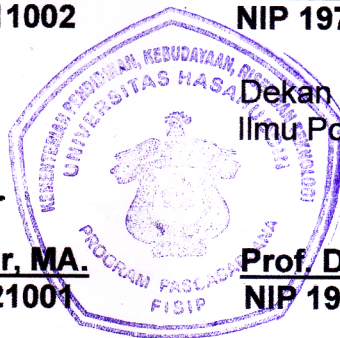

Dr. Tasrifin Tahara, M.Si.
NIP 197508232002121002

Ketua Program Studi
Antropologi,


Dr. Muhammad Basir, MA.
NIP 196206241987021001

Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan
Ilmu Politik Universitas Hasanuddin,


Prof. Dr. Phil. Sukri, S.IP., M.Si.
NIP 197508182008011008



SURAT PERNYATAAN KEASLIAN DISERTASI

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Samsir

Stambuk : E023191004

Program Studi : Ilmu Antropologi

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa disertasi yang saya tulis ini benar-benar merupakan hasil karya saya sendiri, bukan merupakan pengambil alihan tulisan atau pemikiran orang lain. Apabila dikemudian hari terbukti atau dapat dibuktikan bahwa sebagian atau keseluruhan ini disertasi ini hasil karya orang lain saya bersedia menerima sanksi atas perbuatan tersebut.



Makassar, 25 Juli 2024

Samsir

DAFTAR ISI

Halaman Judul.....	i
Surat Pernyataan Keaslian Disertasi	ii
Halaman Persetujuan	iii
Daftar Isi	iv
Kata Pengantar.....	v
Abstrak.....	vi
Daftar Gambar.....	vii
Daftar Peta.....	viii
Daftar Tabel.....	ix
Daftar Bagan.....	x
 BAB I	
PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Rumusan Masalah.....	6
1.3 Tujuan Penelitian	6
1.4 Manfaat Penelitian	6
 BAB II	
TINJAUAN PUSTAKA.....	8
2.1 Agama	8
2.2 Kekuasaan.....	11
2.3 Agen dan Tindakan	23
2.4 Teori Strukturasi.....	28
2.5 Struktur dan Dualitas Struktur.....	33
2.6 Monitoring Refleksi Tindakan	39
2.7 Teori Struktural-Konstruktif	44
2.8 Kerangka Konseptual.....	55
2.7.1 Konsep <i>Erau</i>	59
2.7.2 Konsep Stratifikasi Sosial.....	62
2.7.3 Stratifikasi Sosial Masyarakat Orang Kutai	67
2.7.4 Gelar Kebangsawanan.....	68
 BAB III	
METODE PENELITIAN	75
3.1 Jenis Penelitian	75
3.2 Lokasi Penelitian	76
3.3 Informan Penelitian	77
3.4. Waktu Penelitian	77
3.5 Sumber data dan teknik Pengumpulan Data.....	78
3.6. Teknik analisa Data.....	79
 BAB IV	
GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN.	80
4.1 Sejarah	80
4.1.1 Kerajaan Kutai Kartanegara Masa Islam.....	82
4.1.2 Media Islamisasi.....	94
4.1.3 Perkembangan Islam	96
4.2 Letak dan Keadaan Alam	104

	4.3 Topografi.....	105
	4.4. Pemerintahan	106
	4.5 Kecamatan	107
	4.6 Demografi	111
	4.7 Ekonomi.....	112
	4.8 PDRB dan pendapatan perkapita	113
	4.9 Pendidikan	113
	4.10 Olah Raga.....	114
	4.11 Pariwisata	115
BAB V	PERJUMPAAN TRADISI <i>ERAU</i> DAN BUDAYA ISLAM.....	117
	5.1 Tradisi <i>Erau</i> Budaya Islam	117
	5.2. <i>Erau</i> Struktur Sosial Agama dan Kekuasaan.....	119
	5.3 <i>Erau</i> ; Relasi antara Agama dan Kekuasaan	125
BAB VI	KONTRUKSI UPACARA <i>ERAU</i> PADA TAHAPANNYA, FUNGSI DAN MAKNA.....	127
	6.1 Mendirikan Tiang Ayu	127
	6.1.1 Upacara bepelas Sultan.....	130
	6.1.2 Upacara menyalakan Brong.....	131
	6.1.3 Menjamu Banua.....	132
	6.1.4 Upacara Merangin.....	133
	6.1.5 Upacara Tempong Tawar.....	135
	6.1.6 Upacara Besawai	138
	6.1.7 Upacara Beredar ke Kutai.....	139
	6.1.8 Mengulur Naga Belimbur.....	141
	6.2 Fungsi Upacara <i>Erau</i>	144
	6.3 Makna Upacara	152
	6.3.1 Makna Mendirikan Ayu.....	157
	6.3.2 Makna Upacara Bepelas Sultan.....	158
	6.3.3 Makna Upacara Brong.....	159
	6.3.4 Makna Upacara Menjamu Banua.....	159
	6.3.5 Makna Upacara Merangin.....	161
	6.3.6 Makna Upacara Tempong Tawar.....	162
	6.3.7 Makna Upacara Besawai.....	164
	6.3.8 Makna Upacara Beredar ke Kutai.....	165
	6.3.9 Makna Upacara Mengulur Naga.....	166
	6.4 <i>Erau</i> Masa Modern.....	167
BAB VII :	UPACARA <i>ERAU</i> MEREPRODUKSI DAN MEMPRODUKSI	171
	7.1 Upacara <i>Erau</i> Mereproduksi.....	171
	7.1.1 <i>Erau</i> Terhadap Struktur Kekuasaan.....	171
	7.1.2 Modal Ekonomi.....	174
	7.1.3 Modal Budaya	176
	7.1.4 Modal Sosial.....	177

7.1.5	Modal Simbolik.....	177
7.2	<i>Erau</i> dan Memproduksi	182
7.2.1	Identitas Etnik.....	182
7.2.2	Rekontruksi Identititas Orang Kutai	186
7.2.3	Orang Kutai dan Falsafah Hidup.....	188
BAB VIII	PENUTUP.....	210
8.1	Kesimpulan	210
8.2	Implikasi Teoritis	212

DAFTAR PUSTAKA

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah rabbil „alamin Segala puji bagi Allah SWT Sang Pemilik Cahaya dan Cinta yang telah melimpahkan rahmat serta hidayat-Nya kepada seluruh alam semesta tiada Tuhan selain diri-Nya, maka tiada yang patut disembah melainkan hanya kepada-Nya Shalawat, dan salam kepada Nabi Muhammad SAW beserta keluarga beliau dan sahabat sahabatnya yang terpilih demi Muhammad, semesta diciptakan dan tetap terjaga hingga telah sampai waktunya. Terpuji dan ditinggikan lah para penjaga risalah kenabian, sehingga kebenaran masih tetap terkabarkan panjang umur segala kebaikan, baik yang datang dari langit maupun bumi.

Ide awal penulisan disertasi ini muncul dari renungan panjang dan sekaligus keinginan untuk mencatatkan torehan tinta akademis perihal kajian Antropologi sejarah. Penulis sangat menyadari bahwa dalam penyusunan disertasi ini, masih terdapat sedikit banyak keterbatasan dan kekurangan yang bias jadi belum disadari dan perlu untuk disempurnakan ke depannya. Akan tetapi, paling tidak disertasi ini dapat terselesaikan pada waktunya. Dengan adanya beberapa aspirasi teman dan dosen kami mengenai judul tersebut sehingga Karya akademi Disertasi yang baik adalah yang selesai dan diujikan dalam sidang Oleh karenanya, akhirnya penulis tetap merasa bersyukur dapat menyelesaikan disertasi ini tepat pada waktu yang direncanakan.

ABSTRAK

SAMSIR. *Agama dan Kekuasaan: Studi Upacara Erau di Kutai Kartanegara Provinsi Kalimantan Timur* (dibimbing oleh Mahmud Tang, Ansar Arifin, dan Tasrifin Tahara).

Upacara *Erau* merupakan upacara paling esensi dalam relasi manusia dengan Tuhannya. Upacara ini diwarnai dengan hal yang bersifat ritual yang terdapat panduan komplik antara acara ritual dan acara seremonial yang dilegitimasi oleh Lembaga Kerajaan Kutai Kartanegara. Jenis penelitian ialah etnografi yang mendeskripsikan aktivitas sosial di masyarakat Kutai Kartanegara, Kota Tenggarong, Provinsi Kalimantan Timur. Penelitian ini melingkupi penelitian kepustakaan dan penelitian lapangan. Data dikumpulkan melalui wawancara yang mendalam, pengamatan dan analisis dokumen, informan yaitu tokoh adat, tokoh agama, dan tokoh sejarawan serta orang-orang yang berkelompok dalam struktur masyarakat Kutai. Hasil penelitian menunjukkan bahwa religi dalam upacara *Erau* adalah kecenderungan batin atau rohani manusia selalu berhubungan langsung dengan kekuatan dan alam semesta sehingga agama dan sarana dapat menghubungkan setiap orang dengan orang lain. Prosesi pelaksanaan *Erau* satu kali setiap tahun selama tujuh hari tujuh malam. Upacara *Erau* diawali dengan 'mendirikan pohon ayu'. Setelah itu, bepelas sultan dalam acara ini menampilkan berbagai tarian, sesajen, mantra-mantra semuanya bermaksud untuk mencapai suatu keselamatan dalam negeri. Selain itu, ada upacara menyalakan Brong, menjamu Banua, upacara Merangin, upacara Tempong Tawar, upacara Besawai, upacara Beredar ke Kutai, Mengulur Naga dan Berlimbur. Kemudian, fungsi *Erau* terkait cara pandang masyarakat terhadap hal-hal berdimensi suprastruktur dan dimensi infrastruktur, sedangkan makna upacara merupakan suatu simbol karena peristiwa apa pun merujuk pada suatu benda atau mistik.

Kata kunci: agama, kekuasaan, upacara *Erau*



ABSTRACT

SAMSIR. *Religion and Power: A Study on Erau Ceremony in Kutai Kartanegara, East Kalimantan Province* (supervised by Mahmud Tang, Ansar Arifin and Tasrifin Tahara).

The Erau ceremony is the most essential ceremony in the relationship between humans and their God. This ceremony is colored with the rituals, in which there are the complex guidelines between the ritual event and ceremonial event legitimized by the Kutai Kartanegara royal Institution. This was the ethnographic research which described the social activities in Kutai Kartanegara community in the city of Tenggarong, East Kalimantan Province. This research covered the library research and field research which required the data collected through the in-depth interview, observation and documentary analysis. The informants were the traditional leaders, religious leaders, and historians and people who were the groups in Kutai community structure. The research result indicates that the religion in Erau ceremony is the inner or spiritual tendency of the humans to always relate directly to the force and the universe, so that the religion and facility can connect each person with others. The procession of Erau ceremony is implemented once every year for seven days and seven nights. Erau ceremony begins by "Erecting Ayu tree", after that bepelas sultan in this event performs the various dances, offerings, mantras. All intend to achieve the safety in the country, besides that, there is the ceremony of lighting Brong, entertaining Banua, Merangin ceremony, Tempong Tawar ceremony. Besawal ceremony, Beredar to Kutai ceremony, stalling the dragon and Berlimbur. Then the function of Erau is related to the way people view things in the supra-structure dimension and the infrastructure dimension, while the meaning of the ceremony is the symbol because of any event that refers to some object or mystical object.

Key words: religion, power, Erau ceremony



GAMBAR PETA

Peta 4.2	:	Peta Kutai Kartanegara	110
----------	---	------------------------------	-----

DAFTAR TABEL

Tabel 3.1 : Data Informan.....	76
Tabel 4.1 : Batas Administratif	105
Tabel 4.2 : Daftar Kecamatan	108
Tabel 4.3 : Daerah Pariwisata	110

DAFTAR BAGAN

Bagan 1.1 : Starativikasi Tindakan Manusia	23
Bagan 2.2 : Dualitas Struktur.....	37
Bagan 2.3 : Model Teori Strukturasi... ..	44
Bagan 1.4 : Alur Pikir dan Keterkaitan antar Konsep	58

BAB I PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Manusia sebagai makhluk yang berkongsi, tidak hidup sendiri. Kongsi yang paling primer adalah keluarga dan suku. Dari kongsi tersebut manusia memahami kehidupannya yang bersifat sekuler, di mana manusia harus mempertahankan dan menjamin kehidupannya, di tengah kehidupan manusia lain. Hal-hal yang berkaitan dengan manusia hidup secara berkelompok, membentuk paguyuban dan kemudian menjadi masyarakat atas dasar kesepakatan bersama, tataran berikutnya menghasilkan kota yang diatur oleh penguasa. (Nor Hasan, 2014:299)

Penguasa yang menduduki kekuasaan mempunyai peranan yang dapat menentukan nasib berjuta-juta manusia. Dukungan dalam kekuasaan sangat penting, karena melalui dukungan kekuasaan mendapatkan legitimasi, sementara legitimasi itu memberi hak untuk memiliki, menggunakan dan memberi kekuasaan. Karena itu, pada masyarakat kerajaan maupun negara terdapat proses politik dimana pemimpin masyarakat mengorganisasi yang menggunakan kekuasaannya untuk dipatuhi. (Muhammad Yamin Sani :2014 :13). Namun demikian ketika manusia berada dalam kelompok sosial juga tidak terlepas dengan nilai-nilai yang menyangkut dalam tatanan kehidupan. Dimensi religius adalah menyeberang kekinian dengan mengaitkan dengan asal muasalnya sekaligus dengan suatu alam dimasa depan. Dalam setiap detik hidupnya manusia yang beragama pasti menginginkan dekat dengan tuhan. (Nor Hasan, 2014:299).

Tatanan kehidupan manusia dalam bermasyarakat akan berjalan dengan baik apabila didalamnya diatur dengan norma-norma atau nilai-nilai yang sesuai dengan agama. Dalam beberapa dekade pengaruh agama menjadi bagian penting dari

kehidupan masyarakat. Oleh karena itu penting untuk memahami nilai-nilai agama berdampingan dengan nilai-nilai budaya.

Interaksi dan saling pengaruh antara agama dan adat istiadat merupakan hal yang sering terjadi dalam kehidupan masyarakat diberbagai daerah di Indonesia. Sebagai sebuah agama yang memiliki panduan dan prinsip yang mengatur kehidupan para pengikutnya, sementara adat istiadat merupakan kebiasaan yang meliputi norma dan nilai budaya yang berkembang dalam masyarakat. (Hadinata dkk, 2023:289).

Agama merupakan kepentingan dan pemenuhan kebutuhan dan kepuasan spritualitas masyarakat. Kepentingan untuk beragama muncul dari pengalaman manusia pada hal-hal yang diluar jangkauan kemampuannya. Pada saat itulah akan muncul pengakuan akan adanya super power berkuasa untuk menentukan malapetaka ataupun keberuntungan pada manusia. Pengakuan tersebut pada akhirnya akan membentuk sikap kebergantungan dan pengangkatan diri pada yang diakui untuk mendapatkan keselamatan.

Agama memiliki kemampuan untuk mempengaruhi adat istiadat dengan memberikan landasan nilai dan prinsip moral dalam masyarakat. Dalam ajaran agama mendorong individu untuk menjalani kehidupan sesuai dengan prinsip-prinsip agama, seperti menjaga kehormatan, menerapkan keadilan, memupuk kerja sama dan saling menghormati satu sama lain. Dalam konsep ini, adat istiadat memiliki kemampuan untuk menyerap nilai-nilai agama dan beradaptasi dengan ajaran agama. Sebaliknya adat juga memainkan peran yang signifikan dalam pelaksanaan praktek keagamaan dalam suatu masyarakat. Bahkan sering kali ditemukan adat memberi panduan dalam menjalankan ibadah, upacara keagamaan dan perayaan tertentu. Adat istiadat

berperan sebagai sarana untuk mengungkapkan rasa hormat, penghargaan dan cinta terhadap agama. (Hadinata dkk, 2023: 290)

Selain peran kekuasaan dan agama serta dukungan masyarakat, pentingnya sebuah tradisi menyebabkan suatu upacara selalu diperingati secara teratur pada setiap waktu. Hal ini terjadi karena berbagai konsepsi tentang “sebuah tradisi” memiliki makna yang cukup penting bagi masyarakat. Dari prinsip Antropologi. Tradisi dapat diartikan secara diakronik maupun sinkronik. Laksono, (1985 : 9). Dalam hubungan ini, tradisi dapat dipahami sebagai nilai-nilai masa lalu yang diterima untuk diberikan sebagaimana adanya tanpa terjadi perubahan. Ini berarti tradisi dipertentangkan dengan modernisasi. Sebenarnya tradisi dapat dipahami sebagai jalan bagi masyarakat untuk merumuskan dan menanggapi persoalan dasarnya, maka tradisi seharusnya bersifat luwes dan cair sehingga sebuah tradisi dapat menyesuaikan diri dengan perubahan yang secara terus menerus mengikuti zaman. Ini juga berarti tradisi tidak bersifat absolut akan tetapi selalu bersifat situasional.

Menurut Samsir (2012: 35) menjelaskan bahwa agama Islam dan Kebudayaan yang berkembang di kerajaan Kutai Kerajaan ini berdiri sekitar abad ke 17 M. Islam masuk di Kutai Kartanegara dibawa oleh dua orang Muballig dari minangkabau (Sumatera) setelah di Islamkan kerajaan Gowa Tallo kedua muaballig ini yakni Datuk Ribandang dan Tuan Tunggang Parangan. Kutai Kartanegara masih melaksanakan upacara- upacara adat masih dijumpai pengaruh kebudayaan lama terhadap kebudayaan Islam atau terjadi akulturasi budaya, seperti upacara lingkungan hidup (inisiasi). Kebudayaan Islam sudah mengalami perkembangan dan kemajuan seiring dengan perkembangan Islam Pengaruh budaya Islam dalam kehidupan

masyarakat Kutai nampak baik yang bersifat pengetahuan, hukum, kesenian, dan adat istiadat setempat.

Kutai Kartanegara sebelum masuk Islam, merupakan suatu pengertian yang sangat luas dan beragam didalamnya terkandung segi kehidupan yang dihayati oleh masyarakat Kalimantan Timur meliputi seluruh aspek kemanusiaan itu sendiri. Dan menyangkut hukum, sosial, ekonomi maupun seni budaya dalam arti yang lebih khusus. Ditinjau dari sudut yang demikian, maka kegiatan-kegiatan seni merupakan kiprah budaya masyarakat yang merupakan komponen utama dalam hidup dan kehidupan secara menyeluruh, selain sebagai hasil karya dan ilmu pengetahuan kebudayaan yang telah cukup maju diantaranya bidang seni pahat, dan bidang seni ukir, nampaknya berasal dari zaman kawi. Ketika penduduk meninggalkan kebiasaan-kebiasaan terdahulu, dan menggantikannya dengan pranata masyarakat yang lebih tinggi. Kemudian kedatangan agama Islam lebih meningkatkan kebudayaan ketaraf seperti dewasa ini. Kutai Kartanegara yang memiliki sejarah kerajaan tertua di Indonesia tentu memiliki banyak berbagai budaya. Budaya yang banyak ini selalu dijaga oleh para keturunan raja dari masa ke masa hingga saat ini masih berjalan. (Hadinata dkk, 2023: 289) Hal ini karena semangatnya para keturunan sultan dan masyarakat Kutai Kartanegara dalam menjaga kebudayaan mereka agar tetap terjaga dan tak punah walau sudah berabad-abad umurnya. Salah satu budaya turun temurun yang masih dijaga oleh pihak kesultanan dan masyarakat Kutai Kartanegara adalah *Erau*. (Dhia and Azzuhdi, 2022: 95).

Erau adalah acara sakral yang dilaksanakan tiap tahun atau ketika ada penganugrahan tokoh masyarakat yang dinilai berjasa pada kerajaan. *Erau* merupakan

upacara adat yang dijaga dan dilestarikan secara serius oleh pihak kesultanan Kutai Kartanegara dan masyarakatnya. *Erau* yang diyakini sudah ada sejak abad 13 masehi hingga masuk dan melembaganya agama islam di kerajaan Kutai Kartanegara pada abad 17 melalui tuan tunggang parangan yang berhasil mengislamkan raja Mahkota mulia, *Erau* terus dijalankan setiap tahun oleh masyarakat Kutai Kartanegara. Selain sebagai cara tahunan, *Erau* juga biasanya dilaksanakan berbarengan dengan perayaan ulang tahun kota Tenggarong, dengan tujuan mengenang leluhur dan memuliakan para sultan Kutai Kartanegara. (Hubaib, 2021: 53) Dalam pelestarian dan pemeliharaan upacara *Erau* menjadi bagian yang dihormati dalam warisan budaya masyarakat Kutai Kartanegara. Pemahaman yang seimbang dan terbuka antara agama dan adat istiadat dapat berperan dalam menjaga keharmonisan dan memperkaya kehidupan masyarakat dengan mengacu pada kerangka nilai-nilai agama islam yang kuat.

Dari uraian di atas dapat dipahami bahwa agama tumbuh dan berkembang berdampingan dengan tradisi adat istiadat masyarakat termasuk dalam upacara *Erau*. Berangkat dari hal tersebut, peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan mengangkat judul “Agama dan Kekuasaan: Studi Upacara *Erau* di Kutai Kartanegara”.

Penelitian ini diarahkan untuk mengkaji agama dan kekuasaan; *Erau* fenomena kebudayaan di Kutai Kartanegara yang terkait dengan masa lalu, tetapi juga sebagai simbol budaya yang mengandung sebuah harapan dari elit birokrasi terhadap modernisasi terutama melalui pembangunan Kabupaten Kutai Kartanegara. Dengan demikian, baik dengan masa lalu maupun sekarang.

1.2. Rumusan Masalah

Disertasi ini diarahkan untuk mencoba memahami tradisi *Erau* mengenai Agama, Kekuasaan dan Identitas di Kutai Kartanegara yakni:

1. Bagaimana Perjumpaan tradisi *Erau* terhadap Budaya Islam di Kutai Kartanegara?
2. Bagaimana Konstruksi struktur pelaksanaan upacara *Erau* dan Tahapannya serta fungsi dan makna?
3. Bagaimana upacara *Erau* memproduksi dan mereproduksi modal simbolik, modal ekonomi, modal budaya dan modal sosial dalam struktur kerajaan dan struktur keagamaan pada masyarakat Kutai Kartanegara?

1.3. Tujuan Penelitian

1. Mengetahui struktursasi agama dan Kekuasaan pada pelaksanaan upacara *Erau* dan respon masyarakat di Kutai Kartanegara?
2. Menganalisis konstruksi struktur dalam proses pelaksanaan upacara *Erau* tahapannya serta fungsi dan makna di Kutai Kartanegara?
3. Menganalisis upacara *Erau* memproduksi dan mereproduksi modal simbolik, modal ekonomi, modal budaya dan modal sosial dalam struktur kerajaan dan struktur keagamaan pada masyarakat Kutai Kartanegara?

1.4. Manfaat Penelitian

1. Untuk menambah khasanah keilmuan terutama bidang kebudayaan sehingga dapat memberikan informasi bukti-bukti sejarah masa ampau. Penelitian ini diharapkan dapat berdaya guna dan berhasil guna terutama

dalam pengembangan ilmu pengetahuan dan pelestarian budaya bangsa.

2. Bagi instansi atau pelaksana untuk perlindungan dan pelestarian budaya *Erau* sehingga cagar budaya dapat diwarisi dan dimanfaatkan oleh generasi penerus sebagai khasanah pengembangan ilmu pengetahuan dan kebudayaan.
3. Bagi pemerintah penelitian ini digunakan sebagai masukan untuk peningkata dan pengembangan kepariwisataan

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1. Agama

Agama merupakan kepentingan bagi pemenuhan kebutuhan dan kepuasan spritualitas masyarakat. Kepentingan untuk beragama muncul dari pengalaman ada hal-hal yang diluar jangkauan manusia. Pada saat itulah akan muncul pengakuan akan adanya super power berkuasa untuk menentukan malapetaka atau keberuntungan kepada manusia pengakuan inilah yang pada akhirnya membentuk sikap kebergantungan dan pengikatan diri pada yang diakui untuk mendapatkan ketenangan dan keselamatan.

Istilah agama atau religi adalah kecenderungan bathin atau rohani manusia untuk berhubungan langsung dengan kekuatan dalam alam semesta. Agama dapat sarana yang menghubungkan setiap orang dengan orang lain. Agama juga merupakan suatu ikatan dengan Tuhan, dan ikatan terhadap masyarakat yang sama-sama percaya terhadap aturan upacara dan praktek keagamaan. Dengan demikian agama merupakan suatu ikatan terhadap tradisi warisan yang berasal dari kearifan masa lalu.

Menurut Bernard Raho, agama adalah salah satu institusi sosial dan merupakan bagian salah satu pokok soal dari studi sosiologis. Karena itu agama sebagai satu fakta sosial dan institusi sosial dapat dijadikan sebagai objek studi dari sosiologi. Tugas dan fungsi yang harus dilakukan oleh agama supaya masyarakat bisa bertahan adalah menanamkan nilai-

nilai yang bisa mempersatukan masyarakat dan memberikan makna kepada anggota-anggota masyarakat beragama. Ketika mengalami krisis dalam hidup sehingga mereka bisa bertahan dan meneruskan kehidupannya.

Sementara Geertz oleh Asad dalam novizal Wendry (2016:183) mengategorikan agama sebagai "sebuah kategori antropologikal." Hinduisme didefinisikan sebagai "agama" dengan berbagai cara, "kumpulan dari berbagai kepercayaan dan Praktek religius", "tradisi religius", dan sebagainya.

Kepercayaan masyarakat terinspirasi dari ajaran agama yang dianut oleh mereka seperti cara pemakaman jenazah disesuaikan dengan agama dan kepercayaannya yakni dibakar kemudian dimasukkan kedalam *Tajau* dan selanjutnya disimpan didalam Pura. Proses pemakaman jenazah ini tentunya dilakukan upacara upacara adat yang berlaku sesuai dengan agama dan kepercayaannya.

Kepercayaan yang dimaksud disini adalah suatu keyakinan akan adanya kekuatan yang supranatural yang menguasai manusia. Adapun kepercayaan sebelum Islam seperti yang dikemukakan oleh Koentjaraningrat adalah sebagai berikut: Dewa-dewa yang baik dan jahat, makhluk halus seperti roh leluhur, hantu, kekuatan sakti yang dapat bermanfaat bagi manusia maupun yang dapat membawa bencana.

Dalam suatu sistem kepercayaan, orang membayangkan wujud dari dunia gaib, termasuk wujud dari dewa-dewa (*theogoni*), makhluk-mahluk halus, kekuatan sakti, keadaan roh-roh manusia yang telah meninggal, maupun wujud dari bumi dan alam semesta (yang disebut kosmogoni dan kosmologi). Dalam agama-agama besar seperti Islam, Kristen, Katolik, Hindu dan Yahudi, ada kalanya sifat-sifat Tuhan diserap pula kedalam sistem kepercayaan dari agama-agama yang bersangkutan. Kepercayaan keagamaan yang sudah terpolakan dan Lembaga-lembaga keagamaan.

Panda Koten, (2016:17). Agama memainkan peran yang sangat penting dalam kehidupan sosial, sebagai salah satu elemen dari sistem sosial yang disebut masyarakat yang berkontribusi dalam menentukan keberfungsian masyarakat secara keseluruhan.

Menurut Macionis dalam Barnard Raho, (2019:17) ada tiga fungsi agama yang turut membantu menciptakan masyarakat yang terintegrasi atau *equilibrium* yakni;

Pertama, agama menciptakan kohesi sosial. Agama mempromosikan kesatuan atau kelekatan sosial diantara pemeluk-pemeluknya melalui nilai- nilai dan norma-norma agama itu dirumuskan dalam bentuk doktrin-doktrin dan disebarluaskan melalui khotbah, dakwah, Pelajaran agama dan lain- lain. Tetapi dalam masyarakat sederhana nilai-nilai dan norma-norma itu disebarluaskan melalui adat istiadat, mitologi atau tabu-tabu. Selain nilai dan norma, hal lain bisa mempersatukan masyarakat adalah symbol-simbol keagamaan itu bisa ditemukan baik dalam agama-agama modern maupun dalam agama-agama asli pada masyarakat pra-industri.

Kedua, agama berfungsi melakukan control sosial terhadap para pemeluk atau anggota-anggota suatu agama. Setiap masyarakat pasti memiliki bermacam-macam cara membuat anggotanya patuh pada norma- norma yang ada pada masyarakat dalam jangka panjang bisa bertahan. Norma-norma agama itu biasanya diasalkan pada wujud tertinggi (Tuhan atau dewa-dewa) sehingga mempunyai kekuatan yang luar biasa, guna menjamin kepatuhan dari pada anggota masyarakat agama atau para pemeluk agama yang dilakukan control sosial.

Ketiga, agama memberikan makna kepada manusia yang mengalami krisis-krisis di dalam hidup. Manusia sering kali mengalami situasi-situasi batas seperti ketidak bermaknaan dalam hidup. Dalam situasi seperti itulah kepercayaan

keagamaan menawarkan makna-makna dan tujuan-tujuan hidup karena makna-makna yang diberikan oleh agama.

2.2. Kekuasaan

Kekuasaan mempunyai peranan yang dapat menentukan nasib berjuta-juta manusia, oleh karena itu, kekuasaan (*power*) sangat menarik perhatian para ahli ilmu pengetahuan kemasyarakatan. Kekuasaan selalu muncul di waktu dan tempat tertentu, untuk menyimpulkannya, dikonstruksi asal usulnya serta dilakukannya analisis hubungan kekuasaan. Kekuasaan merupakan kemampuan untuk mempengaruhi pihak lain menurut kehendak yang ada pada pemegang kekuasaan. Kekuasaan terdapat disemua bidang kehidupan yang dijalankan. Kekuasaan mencakup kemampuan untuk memerintah agar yang diperintah patuh, dan juga memberi keputusan-keputusan yang secara langsung dan tidak langsung mempengaruhi tindakan-tindakan pihak lainnya.

Kekuasaan adalah suatu gagasan yang kompleks dan diperdebatkan, terdapat beragam pandangan tentang kekuasaan. Dalam kehidupan sosial, kekuasaan merupakan suatu fenomena yang menarik untuk dikaji, karena manusia sebagai makhluk sosial dalam interaksinya dengan orang lain senantiasa memiliki hasrat untuk berkuasa.(Umar Nain, 2023:2). Menurut Foucault dalam Tappil Rambe dkk, (2019:5) kekuasaan merupakan ilmu pengetahuan itu sendiri.

Menurut Ketut Wiradnyana. Kekuasaan merupakan hasil dari avoirt tersebut dapat bergerak bebas secara tiba-tiba dari satu sistem dominasi (berdasarkan pengetahuan) kesistem dominasi yang lain, sehingga diyakini pengetahuan dan kekuasaan selalu bersaing. (Tappil Rambe dkk ,2019:6). Sedang menurut Max Weber dalam Jeanne Dare N. Manik, menyatakan bahwa kekuasaan adalah kesempatan

seseorang atau sekelompok orang untuk menyadarkan masyarakat akan kemauan-kemauannya sendiri sekaligus menerapkannya terhadap tindakan-tindakan perlawanan dari orang-orang atau golongan tertentu.(Jeanne Dare N. Manik, 2013:16)

Collins mendefinisikan kekuasaan seperti yang dinyatakan Weber, yakni kemampuan individu atau kelompok untuk menginstruksikan sesuatu pada pihak lain dalam konteks ini, kekuasaan yang dimaksud tidak hanya dalam konteks individu saja tetapi juga masuk kelembaga atau organisasi.

Siapapun tidak semata-mata penguasa absolut dari kekuasaan. Dalam konteks ini, kekuasaan itu bersifat sangat halus, terutama ketika melihat bagaimana ia bekerja dan bagaimana ia gagal bekerja. Tidak ada orang mapan dengan kekuasaan yang sudah dipegang orang yang sangat berkuasa sekalipun harus terlibat dalam manipulasi sosial yang cukup kompleks, ia harus melakukan sesuatu sesuai dengan hukum-hukum organisasi sosial ia harus melawan kelompok dibawah yang ingin menggeser kekuasaan itu.

Collins tidak hanya menggambarkan kekuasaan dalam konteks politik tetapi juga dalam realitas mikro ekonomi. Hanya yang perlu ditegaskan disini adalah bahwa konflik dalam ekonomi tidak harus diartikan sebagai antitesis kelas seperti yang dinyatakan Marx, tetapi bisa disebabkan kepentingan ekonomi diri dalam persoalan kerja sehari-hari. Seperti yang bisa kita lihat dalam realitas sehari-hari bahwa orang bekerja tidak hanya menginginkan uang, tetapi mengejar kesenangan lain pula karena setiap orang menginginkan kekuasaan, maka ketika terjadi konflik kekuasaan pasti selalu terlibat. Collins menjelaskan kekuasaan dalam artian umum. Ia tidak membedakan antara kekuasaan dan kewenangan, atau menurutnya, kekuasaan dan

kewenangan itu sama.

Collins menyatakan bahwa ada 3 cara individu atau organisasi mempraktekan kekuasaan, yaitu dengan uang, paksaan dan membangun solidaritas.

2.2.1. Uang bisa menjadi kekuasaan ketika kita memperkerjakan orang lain kita bisa membayar mereka atau mengancam kalau tidak bekerja dengan kualitas baik. Banyak orang terkalahkan karena membutuhkan uang. Hanya menurut Collins, kekuasaan dengan bentuk ini memiliki kelemahan. Ia hanya efektif diPraktekan dalam kelompok kecil. Dalam kelompok besar, mengontrol dengan uang akan menemui banyak masalah. Terlebih kalau sudah masuk birokrasi dengan berbagai macam aturan dan mekanisme, maka kekuatan uang menjadi semakin tidak efektif.

2.2.2. Paksaan, akan bisa menjadi kekuasaan, sebab dilakukan dengan mengancam. Misal, kalau ada pihak-pihak yang melanggar aturan akan diancam dengan pemecatan. Atau kalau berani melawan nyawanya akan terancam hanya saja, paksaan juga tidak lepas dari beberapa kelemahan, karena semua orang tidak mau dipaksa, sebagaimana penjelasan sebelumnya juga siapapun yang mencoba memaksa orang lain akan memiliki buruh dengan semangat kerja yang suka marah. Sama dengan pikiran Skinner bahwa seperti burung merpati, orang lebih suka mendapatkan imbalan ketimbang hukuman. Imbalan lebih sebagai alat untuk mendapatkan kerelaan.

2.2.3. Membangun solidaritas, dengan membangun solidaritas itu lebih efektif, sebab berhasil membuat individu-individu merasa bahwa pekerjaan merupakan bagian dari identitas mereka. Pekerjaan menyumbang pada sesuatu yang mereka percayai atau menyumbang beberapa kelompok yang mereka miliki untuk

membangun solidaritas bisa lewat ritual sosial yang menciptakan perasaan identitas kelompok dan menghasilkan cita-cita yang orang hormati, akan tetapi, penggunaan kekuasaan dengan solidaritas juga memiliki beberapa kelemahan. Ada beberapa kelemahan penggunaan solidaritas, yakni: a). Ritual membutuhkan waktu dan usaha tertentu, dan ia dengan sendirinya tidak benar-benar produktif secara langsung. b) Ritual bisa terselenggara jika mereka sama-sama menanggung kekuasaan organisasi; dan semakin ritual digunakan, semakin kekuasaan didistribusikan kalau semua orang dalam organisasi diberi tanggung jawab untuk kebijakan-kebijakan ke publik, maka akan menjadi sangat sedikit kekuasaan bagi manajer.

Collins menyatakan bahwa kekuasaan dipraktekkan mengikuti kondisi-kondisi tertentu. Dari studi organisasi, maka beberapa profesi adalah posisi yang sangat berkuasa, yakni mereka yang mampu mengontrol wilayah-wilayah ketidakpastian yang sangat penting. Mengapa dokter menduduki pekerjaan dengan imbalan yang lebih dari cukup masyarakat? Jika dokter gagal menyembuhkan, terutama pada deadline tertentu, banyak orang mengasumsikan kesalahan penyakit dan tidak pada dokter. Dokter dikatakan menghadapi penyakit yang sulit untuk mendiagnosisnya. Dunia kedokteran ditandai dengan banyak hal yang lebih tinggi dan sebagai bentuk kekuasaan dokter.

Adapun 3 hal yang dijelaskan di atas suatu analisa penulis bahwa kekuasaan dipraktekkan mengikuti kondisi-kondisi tertentu. karena mereka memiliki untuk membangun solidaritas bisa lewat ritual sosial yang menciptakan perasaan identitas kelompok dan menghasilkan cita-cita untuk membangun kekuasaan solidaritas. Menurut Imam Mujahidin Fahmid (2012:46) kekuasaan menciptakan kondisi yang memungkinkan tercapainya kehidupan sosial itu. Didalam kekuasaan itulah dunia

sosial dihasilkan dan objek-objek dipisahkan satu sama lain dan dengan demikian bisa mencapai karakteristik-karakteristik individu dan hubungan-hubungannya satu sama lain. Misalnya, “Tindak kejahatan” berangsur-angsur telah diciptakan sebagai bidang yang memiliki lembaga-lembaga tersendiri (misalnya penjara), subjek tertentu (misalnya penjahat), dan Praktek-paraktik tertentu (misalnya resoliasasi). Kekuasaan selalu terikat pada pengetahuan kekuasaan; sementara pengetahuan memiliki pra anggapan satu sama lain. Misalnya, sulit membayangkan sistem penjara baru tanpa adanya kriminologi (Foulcault, 2002).

Kekuasaan bertanggung jawab atas penciptaan dunia sosial kita dan atas cara-cara tertentu dalam membicarakan dan membentuk dunia ini, dengan demikian mendorong lahirnya cara-cara alternatif pembicaraan dan keberadaan atas sesuatu. Oleh sebab itu kekuasaan bisa merupakan daya yang produktif sekaligus membelenggu.

Konsep Foulcault, 2017) tentang kekuasaan dan pengetahuan juga mempunyai konsekwensi-konsekwensi lain terhadap konsekwensinya tentang kebenaran. Foulcault menyatakan bahwa tidak mungkin mendapatkan akses kebenaran secara universal karena mustahil membicarakannya dari posisi diluar wacana; tidak ada jalan untuk lolos dari representasi. Dalam wacana tercipta “efek kebenaran” dalam fase arkeologi Foucault (2012), “kebenaran” dipahami sebagai sistem prosedur-prosedur untuk pemroduksian, pengaturan, dan pendifusian kalimat-kalimat.

Dalam fase geneakologinya, Foucault (2012) membuat hubungan antara kebenaran dan kekuasaan, dengan menyatakan bahwa : “kebenaran” disematkan dalam dan dihasilkan oleh, sistem kekuasaan. Karena kebenaran itu tidak bisa dicapai, akan sia-sia bila menayakan apakah sesuatu itu benar atau salah.

Namun, fokus perhatiannya, hendaknya, ditujukan pada bagaimana efek-efek kebenaran itu tidak bisa diciptakan dalam wacana. Apa yang harus dianalisis adalah proses kewacanaan untuk mengonstruksi wacana-wacana dengan cara yang sekiranya bisa memberika kesan bahwa wacana-wacana itu memberikan gambaran-gambaran benar atau salah tentang realitas.

Dari sekian banyak studi yang membagi sumber dan bentuk kekuasaan usaha yang dilakukan French yang kemudian ditambahkan oleh Hersey dan Goldsmith, menagtakan bahwa bentuk kekuasaan yakni;

1. Kekuasaan paksaan, kekuasaan ini berdasarkan atas rasa takut, dengan demikian sumber kekuasaan diperoleh dari rasa takut, pemimpin yang mempunyai kekuasaan jenis ini mempunyai kemam[uan untuk mengenalkan hukuman.
2. Kekuasaan legitimasi, kekuasaan semacam ini bersumber pada jabatan yang dipegang oleh pemimpin. Secara normal, semakin tinggi posisi seorang pemimpin, maka semakin besar kekuasaan legimitasinya. Seorang pemimpin yang tinggi kekuasaan legimitasinya mempunyai kecenderungan untuk mempengaruhi orang lain, karena pemimpin tersebut merasakan bahwa ia mempunyai hak atau wewenang yang diperoleh dari jabatan dalam orgaisasinya.
3. Kekuasaan keahlian, kekuasaan ini bersumber dari keahlian, kecakapan, atau pengetahuan yang dimiliki oleh seorang pemimpin yang mewujudkan karena rasa hormat dan pengaruhnya terhadap orang lain.
4. Kekuasaan penghargaan, kekuasaan ini bersumber dari kemampuan untuk menyediakan penghargaan atau hadiah bagi orang lain. Jenis kekuasaan ini

bergantung pada seseorang yang mempunyai sumber untuk menghargai atau memberikan hadiah.

5. Kekuasaan yang bersumber sifat-sifat pribadi seorang pemimpin.

Seorang pemimpin yang tinggi kekuasaan referensinya ini pada umumnya disenangi dan dikagumi oleh orang lain karena kepribadiannya.

6. Kekuasaan yang bersumber adanya akses informasi yang dimiliki oleh pemimpin yang nilai sangat berharga oleh pengikutnya. Sebagai seorang pemimpin, maka semua informasi mengenai organisasinya ada pada dirinya. Begitupula informasi yang datang dari luar organisasi.

7. Kekuasaan yang bersumber dari hubungan yang dijalin oleh pimpinan dengan orang-orang penting dan berpengaruh baik dari luar atau didalam organisasi. Seorang pemimpin yang tinggi kekuasaan hubungannya ini cenderung meminta saran-saran dari orang lain, karena mereka membantu mendapatkan hal yang menyenangkan serta menghilangkan yang tidak menyenangkan dari kekuasaan. (R.Ahmad Buchari & Siti Marwiyah, 2019: 14-15)

Collins menyatakan bahwa kekuasaan diPraktekkan mengikuti kondisi kondisi tertentu. Dari studi organisasi, maka beberapa profesi adalah posisi yang sangat berkuasa, yakni mereka yang mampu mengontrol wilayah-wilayah ketidakpastian yang sangat penting. Mengapa dokter menduduki pekerjaan dengan imbalan yang lebih dari cukup masyarakat? Jika dokter gagal menyembuhkan, terutama pada deadline tertentu, banyak orang mengasumsikan kesalahan penyakit dan tidak pada dokter. Dokter dikatakan menghadapi penyakit yang sulit untuk mendiagnosisnya. Dunia kedokteran ditandai dengan banyak hal yang lebih tinggi dan sebagai bentuk

kekuasaan dokter.

Adapun hal yang dijelaskan diatas suatu analisa penulis bahwa kekuasaan diPraktekan mengikuti kondisi-kondisi tertentu. karena mereka miliki untuk membangun solidaritas bisa lewat ritual sosial yang menciptakan perasaan identitas kelompok dan menghasilkan cita-cita untuk membangun kekuasaan solidaritas. Menurut Imam Mujahidin Fahmid (2012: 46) kekuasaan menciptakan kondisi yang memungkinkan tercapainya kehidupan sosial itu. Didalam kekuasaan itulah dunia sosial dihasilkan dan objek-objek dipisahkan satu sama lain dan dengan demikian bisa mencapai karakteristik-karakteristik individu dan hubungan-hubungannya satu sama lain. Misalnya, "Tindak kejahatan" berangsur-angsur telah diciptakan sebagai bidang yang memiliki lembaga-lembaga tersendiri (misalnya penjara), subjek tertentu (misalnya penjahat), dan Praktek-paraktik tertentu (misalnya resoliasasi). Kekuasaan selalu terikat pada pengetahuan kekuasaan; sementara pengetahuan memiliki pra anggapan satu sama lain. Misalnya, sulit membayangkan sistem penjara baru tanpa adanya kriminologi.

Kekuasaan bertanggung jawab atas penciptaan dunia sosial dan atas cara-cara tertentu dalam membicarakan dan membentuk dunia ini, dengan demikian mendorong lahirnya cara-cara alternatif pembicaraan dan keberadaan atas sesuatu. Oleh sebab itu kekuasaan bisa merupakan daya yang produktif sekaligus membelenggu.

Konsep Foulcault, tentang kekuasaan dan pengetahuan juga mempunyai konsekwensi-konsekwensi lain terhadap konsekwensinya tentang kebenaran. Foulcault menyatakan bahwa tidak mungkin mendapatkan akses kebenaran secara universal karena mustahil membicarakannya dari posisi diluar wacana; tidak ada jalan

untuk lolos dari representasi.

Dalam wacana tercipta “efek kebenaran” dalam fase arkeologi Foucault (2012), “kebenaran” dipahami sebagai sistem prosedur-prosedur untuk pemroduksian, pengaturan, dan pendifusian kalimat-kalimat.

Dalam fase genealoginya, Foucault (2012) membuat hubungan antara kebenaran dan kekuasaan, dengan menyatakan bahwa : “kebenaran” disematkan dalam dan dihasilkan oleh, sistem kekuasaan. Karena kebenaran itu tidak bisa dicapai, akan sia-sia bila menanyakan apakah sesuatu itu benar atau salah. Namun, fokus perhatiannya, hendaknya, ditujukan pada bagaimana efek-efek kebenaran itu tidak bisa diciptakan dalam wacana. Apa yang harus dianalisis adalah proses kewacanaan untuk mengonstruksi wacana-wacana dengan cara yang sekiranya bisa memberikan kesan bahwa wacana-wacana itu memberikan gambaran-gambaran benar atau salah tentang realitas.

2.3. Agen dan Tindakan

Banyak teori sosial, terutama yang berhubungan dengan sosiologi struktural, memandang agen tidak banyak memiliki pengetahuan, padahal yang benar sebaliknya. Bagi Giddens, individu adalah agen yang memiliki pengetahuan banyak (*knowledgeable agent*) dan kemampuan memahami tindakannya sendiri. (Rilus A Kinseng, 2017:128). Agen merupakan suatu dimensi dari Tindakan manusia yang mengandung kreativitas, spontanitas, tak terduga. Selanjutnya Sewell dalam Kinseng (2017:131), menjelaskan bawa agen menunjukkan adanya kemampuan dalam derajat tertentu untuk melakukan control atas relasi sosial diman si agen tersebut berada, dan pada gilirannya itu berarti kemampuan untuk mentransformasikan relasi sosial tersebut dalam derajat tertentu. Agen menyangkut menyangkut kehendak, Tindakan

secara kreatif dan juga kemampuan untuk mengkoordinasi Tindakan seseorang dengan orang lain maupun berhadapan dengan orang lain. Mereka bukan lapisan budaya atau para penopang hubungan- hubungan sosial belaka, akan tetapi mereka adalah para aktor terampil yang memiliki pengetahuan yang banyak tentang dunia yang mereka geluti. Semua aktor sosial adalah teoritis sosial dan harus seperti itu untuk menjadi agen-agen sosial yang sesungguhnya. Salah satu kontribusi khas dari fenomenologi adalah menunjukkan bahwa (1) beroperasinya kehidupan sosial terus menerus melibatkan „kegiatan berteori“, (2) bahkan kebiasaan-kebiasaan yang paling bertahan lama atau norma-norma yang paling mapan sekalipun melibatkan perhatian reflektif yang terus menerus dan mendetail. Rutinitas merupakan elemen penting dalam kehidupan sosial; tetapi semua rutinitas, selalu tidak dapat dipastikan dan merupakan pencapaian yang berpotensi mudah hancur (Giddens,1993:xvi).

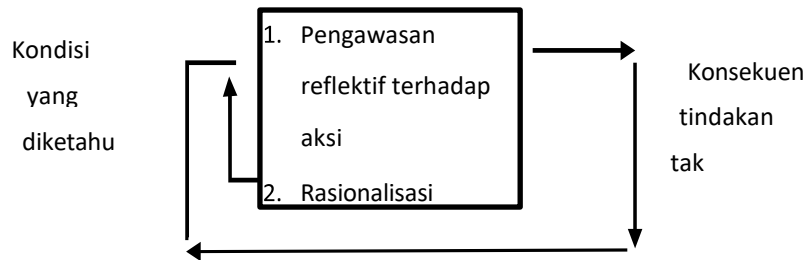
Para aktor awam sendiri adalah para teoritis sosial yang teori. Mereka berperan membentuk aktivitas-aktivitas dan institusi yang menjadi objek kajian para peneliti sosial atau para ahli ilmuwan sosial, inilah yang dinamakan *hermeneutika ganda*. Tafsir pertama dilakukan oleh aktor, sedangkan tafsir kedua dilakukan oleh ahli ilmu sosial. Tidak ada batas yang jelas antara refleksi sosiologis sadar yang dilakukan oleh para aktor awam dan usaha-usaha serupa dari kalangan para ahli. Ilmuwan sosial sama sekali tidak memiliki hak untuk memonopoli teori- teori inovatif maupun penyelidikan-penyelidikan empiris atas apa yang mereka pelajari (Giddens, 1984: xxxviii).

Setiap aktor yang kompeten memiliki pengetahuan yang luas, namun akrab dan halus, tentang masyarakat yang menjadi induknya. Dalam Teori Strukturasi, pengetahuan dipahami dalam istilah kesadaran praktis sekaligus diskursif, dan

setiap aktor individual hanyalah salah satu diantara sekian dalam masyarakat, harus diakui bahwa sesuatu yang diketahui oleh seseorang anggota masyarakat yang kompeten “mengalami peragaman warna” di dalam konteks yang merentang melampaui konteks aktivitas sehari-hari. parameter kesadaran praktis dan diskursif terikat secara spesifik, yang berhubungan dengan sifat aktivitas aktor yang „menempati ruang”, namun tidak direduksi menjadi sifat (Kingseng, 2017:133).

Aspek tindakan dan agensi yang bermacam-macam merupakan bagian dari apa yang oleh Giddens disebut sebagai “model stratifikasi tindakan”. Model ini menggambarkan batasan-batasan usaha menganalisis tindakan dengan memfokuskan pada agen individu. Giddens menggambarkan aktor dan tindakannya dalam stratifikasi tindakan seperti pada :

Gambar : 2.1 Stratifikasi Tindakan Manusia



Bagan 2.1. Stratifikasi Tindakan Manusia

Tindakan manusia dimulai dari pengawasan reflektif terhadap perilaku yang mengacu pada sifat intensionalitas atau bertujuan perbuatan manusia; aspek ini menekankan “kesengajaan” sebagai proses. Kesengajaan semacam itu merupakan sifat tetap perilaku manusia, dan tidak menyiratkan bahwa para aktor memiliki tujuan pasti yang disadari sepenuhnya di dalam benak sepanjang berlangsungnya aktivitas mereka (Giddens, 1979:95-96). Pengawasan reflektif atas tindakan merupakan satu unsur tetap dari tindakan sehari-hari dan melibatkan tidak hanya perilaku individu, namun juga perilaku dari individu-individu lainnya. Maksudnya, para aktor tidak hanya memonitor secara terus menerus arus aktivitas mereka dan orang lain melakukan hal yang sama, melainkan para aktor juga secara rutin memonitor aspek-aspek baik sosial maupun fisik, dari konteks-konteks tempat dimana mereka bergerak (Giddens, 1984:7-8).

Dalam melakukan tindakan, agen dibatasi oleh konsekuensi tindakan-konsekuensi tindakan yang tidak dikendaki (*unintended consequences of action*) atau kondisi-kondisi tindakan yang tidak diketahui (*unacknowledge condition of action*). Konsekuensi yang tidak disengaja dapat menjadi kondisi-kondisi yang tidak diketahui

sepanjang konsekuensi yang tidak disengaja tersebut merupakan pengembangan dari struktur yang akan memungkinkan tindakan selanjutnya (Thompson, 1984:243).

Sedangkan yang dimaksud dengan rasionalisasi tindakan adalah bahwa para aktor-juga secara rutin dan kebanyakan tanpa perdebatan mempertahankan suatu „pemahaman teoritis“ yang secara terus menerus tentang landasan-landasn aktivitas mereka (Giddens, 1984:8). Rasionalisasi tindakan merujuk kepada alasan- alasan yang ditawarkan pada agen dalam menjelaskan tindakannya, maka “motivasi tindakan” merujuk pada motif-motiv dan keinginan-keinginan yang mendorong munculnya tindakan itu (Thompson, 1984:242). Giddens membedakan antara pengawasan refleksif dan rasionalisasi tindakan dari sisi motivasinya. Alasan mengacu kepada dasar-dasar tindakan, motif mengacu kepada keinginan-keinginan yang mendorongnya.

Motivasi mengacu kepada potensi tindakan, bukan kepada cara tindakan dilakukan terus menerus oleh agen yang bersangkutan (Giddens, 1984:9). Aktor kompeten hampir selalu bisa melaporkan secara diskursif maksud- maksud dan alasan-alasan mereka saat sedang melakukan tindakan, mereka tidak mesti bisa melakukan hal yang sama terhadap motif-motif mereka (Giddens, 1984:9-10). Gagasan tentang kesadaran praktis, kesadaran diskursif dan motif motif tidak sadar sangat penting dalam teori Strukturasi. Giddens menawarkan konsep ini dalam rangka mengganti tritunggal psikoanalisis tradisional, yaitu *ego*, *super ego*, dan *Id*. (Giddens, 1984:10-11). Kesadaran diskursif mengandung kemampuan untuk melukiskan tindakan individu dengan kata-kata. Kesadaran praktis meliputi tindakan-tindakan yang diterima begitu saja oleh para aktor, tanpa mampu mengungkapkan dalam kata kata apa yang sedang mereka lakukan (Ritzer, 2012:891).

Tindakan merupakan sebuah proses berkesinambungan, sebuah arus yang didalamnya kemampuan intropeksi dan mawas diri yang dimiliki individu sangat penting bagi pengendalian terhadap tubuh yang biasa dijalankan oleh para aktor dalam kehidupan keseharian mereka. Keberlangsungan kehidupan sehari-hari (*durée of day to day life*) mengalir sebagai arus tindakan disengaja. Namun, tindak- tindak memiliki konsekuensi yang tidak disengaja. Konsekuensi tidak disengaja bisa secara sistematis memberikan umpan balik untuk menjadi konsekuensi tidak terkenali dari tindak- tindak selanjutnya (Giddens, 1984:12).

Apa yang dimaksud dengan konsekuensi tidak disengaja? Ada anggapan bahwa agensi manusia bisa ditetapkan manusia berdasarkan maksud-maksud. Artinya, agar sebuah perilaku bisa dianggap sebagai tindakan, siapapun yang melakukannya harus bermaksud melakukan tindakan, jika tidak, maka perilaku itu hanyalah respon reaktif belaka (Giddens, 1984:12). Sebuah kejadian dianggap sebagai agensi jika apa yang dilakukan agen itu disengaja berdasarkan deskripsi, sekalipun agen keliru mengenai deskripsi itu (Giddens, 1984:13). Untuk memahami apa itu melakukan sesuatu secara tidak sengaja, pertama harus dirumuskan dulu pengertian "disengaja". Giddens memaknai "disengaja" sebagai tindakan yang diketahui atau diyakini oleh pelakunya akan memiliki kualitas atau hasil tertentu dan ketika pengetahuan seperti itu dimanfaatkan oleh pelaku untuk memperoleh kualitas ini (Giddens, 1984:16). Dengan konsep ini, Giddens memisahkan antara perbuatan seorang agen dari „maksud“ kesengajaan perbuatan. Semakin jauh rentang dan waktu konsekuensi- konsekuensi dari konteks tindakan pertama, maka semakin kecil kemungkinan konsekuensi-konsekuensi disengaja- namun anggapan ini dipengaruhi oleh lingkup daya pengetahuan yang dimiliki oleh para aktor dan daya

kuasa memobilisasi (Giddens, 1984:17).

2.4 Teori Strukturalisasi

Problem hubungan antara manusia dan masyarakat atau tindakan dan struktur sosial berada pada inti persoalan teori sosial dan filsafat ilmu sosial (Thompson, 1994:56). Perdebatannya berkaitan diantara mana yang lebih penting antara individu dan struktur. Biasanya, beberapa pemecahan yang diambil dititik beratkan pada satu istilah dengan cara mengabaikan yang lain, baik struktural sosial yang diambil sebagai objek pokok penerapan analisisnya dan alat yang secara efektif justru berlebihan. Atau individu- individu yang hanya dilihat sebagai unsur pokok dari kelompok aksi dan reaksi sosial.

Dalam teori sosial terdapat pertanyaan yang kadang diajukan sebagai keinginan kuat untuk membangun analisa yang mapan, seperti pertanyaan “bagaimana” dan “dengan cara apa” tindakan yang dihasilkan agen-agen individu berkaitan dengan ciri-ciri struktural masyarakat yang didiami (Thompson, 1984:238). Teori Strukturalisasi sebagai bagian dari contoh hasil perdebatan atas hubungan agen-struktur (di Eropa), dan hubungan makro- mikro (di Amerika). (Ritzer, 2003:471-505). Giddens menawarkan konseptualisasi ulang antara „makro” dan „mikro” berkaitan dengan cara bagaimana interaksi dalam konteks pertemuan muka dilibatkan secara struktural dalam sistem -sistem perentangan ruang dan waktu yang luas, dengan kata lain, bagaimana sistem-sistem seperti ini menjangkau sektor- sektor luas dari ruang dan waktu (Giddens, 1984:xxvii). Teori Strukturalisasi muncul berasal dari kekosongan teori aksi dalam ilmu-ilmu sosial (Giddens, 1979:xiii). Isu utama yang diperdebatkan adalah seputar bagaimana konsep-konsep tindakan, makna dan subjektivitas harus dijelaskan dan bagaimana kaitannya dengan gagasan-gagasan tentang struktur dan

kekangan. Jika sosiologi interpretatif didasarkan atas imperialisme subjek, fungsionalisme dan strukturalisme mengetengahkan imperialisme objek sosial. Salah tujuan utama merumuskan teori Strukturasi adalah mengakhiri masing-masing imperialisme ini (Giddens, 1984: 3).

Sementara itu, Giddens (1979:108-111) juga memberikan catatan atas gagasan Levi-Strauss, yaitu (1) struktur bermakna sebuah model yang dibangun oleh pengamat, dan menurut kata-katanya „tidak ada sangkut pautnya dengan dunia empiris. Giddens berpendapat struktur memiliki “eksistensi maya”, (2) strukturalisme Levi-Strauss kurang konsep *struktur sebagai strukturasi*, (3) pendekatan Levi-Strauss tampaknya ambigu ketika menganggap struktur sebagai relasi diantara serangkaian unsur atau opisisi simpulan. Giddens tidak memandang struktur, dalam pengertiannya yang paling dasar, merujuk pada bentuk bentuk himpunan, namun lebih mengacu kepada aturan dan sumber daya, yang dalam reproduksi sosial “mengikat waktu, (4) gagasan tentang struktur yang digunakan oleh Levi-Strauss berkaitan dengan kelemahan dasar, dalam kaitannya penciptaan ruang semantik Praksis. Berbicara secara ketat itu tidak ada sesuatu yang disebut “aturan transformatif” semua aturan sosial berciri transformasional, dalam pengertian bahwa struktur tidak termanifestasikan ke dalam empiris aspek- aspek sosial, (5) jikalau struktur hadir (dalam ruang-waktu) hanya dalam wujud sekilas, maka struktur pasti meliputi acuan ke fenomena yang sangat asing bagai upaya Strauss untuk mengatasi formalisme dengan menekankan bentuk sebagai perwujudan isi;fenomena yang berkaitan dengan kekuasaan.

Pada sisi lain, Interaksionalisme simbolik sangat menitikberatkan pandangan tentang kehidupan sosial sebagai sebuah prestasi aktif dari para aktor yang

berpengetahuan dan bertujuan, dan interaksionisme simbolik dikaitkan dengan teori subjek, seperti yang diuraikan Mead bahwa asal usul sosial bagi kesadaran reflektif (Giddens, 1979:84).

Interaksionalisme simbolik diyakini sebagai „sosiologi mikro“ yang berurusan dengan hubungan „antar-pribadi, skala kecil, sedangkan tugas- tugas sosiologi makro yang lebih luas ditangani oleh fungsionalisme (Giddens, 1979:84). Bagi Giddens, apa yang dipaparkan interaksionalisme simbolik tidak memadai untuk menjelaskan perilaku manusia. Bagi Giddens, pelaku manusia, pertama, harus dikaitkan dengan teori tentang subjek yang beraksi, dan kedua harus menempatkan aksi ke dalam ruang dan waktu sebagai arus perilaku yang terus mengalir, bukannya memperlakukan tujuan, alasan, dan lainlain sebagai sesuatu yang dihimpun bersama-sama (Giddens, 1979:xiv). Perilaku aktor di dalam masyarakat harus disikapi sebagai hasil dari perpaduan antara determinan sosial dan psikologis, ketika determinan sosial mendominasi determinan yang dialamatkan kepada unsur-unsur normatif (Giddens, 1979:87). Giddens memahami teori subjek mencakup model stratifikasi kepribadian yang disusun berdasarkan tiga lapis hubungan, yaitu alam tak sadar, kesadaran praktis, dan kesadaran diskursif. Inilah yang nantinya menjadi fundamental Teori Strukturasi (Giddens, 1979:xiv). Giddens berusaha melintasi orientasi yang bermacam-macam itu dengan memikirkan kembali tujuan, dan hubungan antara tindakan dan struktur. Term yang digunakan adalah dualitas struktur. “Melalui dualitas struktur”, Giddens memaksudkan bahwa struktur sosial (keduanya) terdapat dalam lembaga sosial dan pada saat yang sama struktur tersebut menjadi aturan yang sangat sederhana. Setiap tindakan produksi secara bersamaan berarti tindakan reproduksi:struktur yang memungkinkan suatu tindakan dikembangkan (Thompson,

1984:240- 241).

Bagi Giddens, objek utama ilmu sosial bukanlah peran sosial seperti dalam Fungsionalisme Parsons, bukan kode tersembunyi seperti dalam Strukturalismenya Levi-Strauss, bukan juga keunikan-situasional seperti dalam Interaksionisme Goffman (Priyono, 2000:6). Menurut Teori Strukturasi, domain kajian ilmu-ilmu sosial adalah *Praktek-Praktek sosial* yang terjadi disepanjang ruang dan waktu. Maksudnya, aktivitas-aktivitas sosial itu tidak dihadirkan oleh para aktor sosial, melainkan terus menerus diciptakan oleh mereka melalui sarana-sarana pengungkapan diri mereka sebagai aktor. Di dalam dan melalui aktivitas-aktivitas mereka, para agen memproduksi kondisi-kondisi yang memungkinkan keberadaan aktivitas- aktivitas itu (Giddens, 1984:3). Konsep Teori Strukturasi terletak pada ide- ide mengenai *agen, struktur, sistem, dan dualitas struktur*.

2.5 . Struktur dan Dualitas Struktur

Tujuan teori Strukturasi adalah menjelaskan *hubungan dialektika dan saling pengaruh mempengaruhi* antara *agen* dan *struktur*. Dengan demikian, *agen* dan *struktur* tidak bisa dipahami dalam keadaan saling terpisah satu sama lain. *Agen* dan *struktur* saling menjalin tanpa terpisahkan dalam Praktek atau aktivitas manusia. Mereka adalah *dualitas* (Ritzer, 2003:889). Aktivitas manusia bukanlah hasil sekali jadi oleh aktor sosial, tetapi secara terus menerus mereka ciptakan ulang melalui suatu cara, dan dengan cara itu juga mereka menyatakan diri mereka sendiri sebagai aktor. Di dalam dan melalui aktivitas mereka, agen menciptakan kondisi yang memungkinkan aktivitas ini berlangsung. Secara umum, Giddens memusatkan perhatian pada *proses dialektika* dimana *Praktek sosial, struktur, dan kesadaran* diciptakan (Ritzer, 2003:508).

Giddens memaknai struktur sebagai aturan dan sumber yang disusun sebagai sifat-sifat sistem sosial. Struktur hanya hadir sebagai “sifat-sifat struktural”. sifat struktural” atau lebih tepatnya “sifat pemolaan” merujuk pada sifat-sifat pemolaan yang memungkinkan untuk „mengikat” waktu dan ruang dalam sistem sosial. Giddens berpendapat bahwa sifat-sifat ini dapat dipahami sebagai aturan dan sumber daya, yang terus menerus terlibat ke dalam reproduksi sosial. Struktur hadir secara paradigmatik, sebagai serangkaian perbedaan yang tidak kasat mata (*virtual*), yang hanya „hadir” secara temporal dalam wujud sekilasnya, dalam momen-momen membentuk sistem sosial (Giddens, 1979: 111).

Struktur bisa dikonseptualisasikan secara abstrak sebagai dua aspek dari aturan, yaitu unsur- unsur normatif dan kode penandaan. Sumber daya juga memiliki dua jenis, sumber daya otoritatif yang berasal dari koordinasi aktivitas para agen manusia, dan sumber daya alokatif, yang berasal dari kontrol atas produk material atau aspek-aspek dunia material (Giddens, 1984:xxxvi). Struktur berasal dari kebiasaan-kebiasaan yang ditetapkan sebagai standar dan, dengan demikian, sangat berhubungan dengan institusionalisasi dan memberi bentuk pada pengaruh-pengaruh yang sangat dominan dalam kehidupan sosial (Giddens,1993:xx).

Giddens membedakan antara struktur sebagai aturan-aturan dan sumber daya-sumber daya (dalam kesatuan), dan struktur sebagai seperangkat aturan dan sumber daya (terpisah) dengan alasan sebagai berikut, yaitu (a) aturan kerap dipahami sebagai ketentuan formal, aturan dalam reproduksi sosial secara umum tidaklah demikian, (b) aturan sering dipahami sebagai bentuknya yang tunggal, padahal dalam struktur Giddens tidaklah demikian, (c) aturan tidak dapat dikonseptualisasikan terpisah dari sumber daya, yang merujuk pada cara-cara bagaimana relasi-relasi

transformatif sebenarnya terlibat dalam proses produksi dan reproduksi praktek-praktis sosial. Oleh karena itu, kelengkapan struktural memperlihatkan dominasi dan kekuasaan (d) aturan mengandaikan “prosedur-prosedur metadis”. Aturan terutama bersinggungan dengan Praktek- praktis sosial dalam kontekstualitas perjumpaan tertentu, (e) bagi mereka, aturan memiliki dua aspek dan penting untuk membedakan keduanya secara konseptual, karena sejumlah penulis filsafat cenderung menggabungkan kedua aspek itu (Giddens, 1984:28-29). Giddens memaknai struktur seperti itu untuk melepaskan diri dari karakter tetap atau mekanis penggunaan struktur dalam sosiologi ortodoks. Konsep tentang sistem dan strukturasi banyak mendominasi sehingga „struktur” banyak membantu menjelaskan (Giddens, 1984:29).

Bagi para pemerhati strukturalis, struktur tampil sebagai sebagai “sesuatu yang berada diluar” tindakan manusia, sebagai sumber pengekan inisiatif bebas subjek yang mandiri. Di sisi lain, konseptualisasi strukturalis dan post-strukturalis tentang gagasan struktur lebih menarik. Bagi strukturalis dan strukturasi, struktur dipandang sebagai bukan penciptaan pola-pola terhadap kehadiran, melainkan sebagai persinggungan antara kehadiran dan ketidakhadiran, kode-kode pokok harus diperoleh dari penampakan-penampakan luar (Giddens, 1984:26). Berangkat dari sudut pandang itu, teori strukturasi dipahami melalui pengenalan- pengenalan terhadap perbedaan antara konsep struktur dan konsep sistem. Ketika menganalisis relasi-relasi sosial, harus mengakui dimensi sintagmatik penciptaan pola relasi-relasi sosial dalam ruang dan waktu yang melibatkan reproduksi Praktek- Praktek sosial tertentu, dan dimensi paradigmatic yang melibatkan tatanan sesungguhnya dari „cara-cara penstrukturasi”, yang terus menerus dilibatkan dalam reproduksi semacam itu

(Giddens, 1984:26).

Dalam analisis sosial, struktur merujuk pada kelengkapan-kelengkapan penstrukturan yang memungkinkan „pengikatan” waktu-ruang dalam sistem-sistem sosial. Kelengkapan-kelengkapan ini memungkinkan keberadaan Praktek-Praktek sosial dalam rentang ruang dan waktu yang sangat beragam sekaligus memberikan Praktek-Praktek sosial itu suatu bentuk „sistemik” (Giddens, 1984:27). Mengatakan bahwa struktur adalah „tatatan sesungguhnya” dari relasi-relasi transformatif berarti bahwa sistem sosial, sebagai Praktek-Praktek sosial yang direproduksi, tidaklah memiliki „struktur”, melainkan tepatnya menampilkan „kelengkapan- kelengkapan struktural”. Hal ini berarti bahwa struktur itu ada, sebagai kehadiran ruang dan waktu, hanya dalam perwujudannya dalam Praktek- Praktek tersebut dan sebagai jejak-jejak ingatan berorientasi pada perilaku para agen manusia pintar (Giddens, 1984:27).

Struktur tidak boleh disamakan dengan kekangan, namun meskipun demikian struktur bersifat mengekang dan membolehkan. Tentu saja, ini tidak berarti kelengkapan-kelengkapan tertstruktur dari sistem- sistem sosial tidak bergerak, dalam, ruang dan waktu, di luar kontrol sosial dari masing-masing aktor (Giddens, 1984:41). Bagi kelengkapan kelengkapan struktural yang mengakar paling kuat dan terlibat dalam reproduksi totalitas kemasyarakatan disebut dengan „dasa-dasar struktural (*structural principles*). Sementara Praktek-Praktek yang memiliki perluasan ruang dan waktu terbesar didalam totalitas disebut dengan institusi- institusi (Giddens, 1984:27-28). Kebanyakan analisis sosial menganggap ruang dan waktu sekedar sebagai lingkungan-lingkungan tindakan dan menerima begitu saja tentang waktu itu, seperti jam waktu yang bisa diukur (Giddens, 1984:169). Geografi-waktu berkenaan dengan pengekan-engekan yang membentuk rutinitas kehidupan sehari-hari dan

bersama teori strukturasi memberikan penekanan pentingnya sifat praktis dari aktivitas-aktivitas sehari-hari, dalam keadaan pertemuan muka, bagi terbentuknya perilaku sosial (Giddens, 1984:179).

Regionalisasi mesti dipahami tidak hanya sebagai lokalisasi dalam ruang, namun juga mengacu pada penentuan zona ruang dan waktu dalam kaitannya dengan Praktek-Praktek sosial rutin (Giddens, 1984:183). Salah satu dari karakter regionalisasi adalah tingkat ketersediaankehadiran terkait dengan bentuk-bentuk lokaal tertentu. Gagasan „ketersediaan-kehadiran” merupakan tambahan yang sangat penting bagi gagasan pertemuan muka (Giddens, 1984:189). Relevansi antara regionalisasi dengan strukturasi tampak pada pen-zona-an dalam situasi berbeda. Konsep „muka” dan „depan” berkaitan dengan pemosisian tubuh di dalam perjumpaan- perjumpaan. Regionalisasi tubuh menjelaskan „bagian-bagian luar” tubuh memiliki mitra ruag dalam regionalisasi konteks-konteks interaksi. Regionalisasi dipagari oleh zona-zona ruang dan waktu, yang memungkinkan dipertahankannya relasi khas antara bagian „depan” dan „belakang” yang digunakan oleh para aktor dalam menyusun kontekstualitas tindakan dan pemeliharaan rasa aman ontologis (Giddens, 1984:191).

Sistem sosial melibatkan hubungan ketergantungan timbal- balik yang teratur diantara individu atau kelompok, yang lazimnya dapat dianalisis dengan sebaik-baiknya sebagai *Praktek-Praktek sosial berulang*. Sistem, dalam terminologi ini memiliki struktur, atau lebih akuratnya” memiliki sifat-sifat struktural; sistem bukanlah struktur itu sendiri. Struktur secara otomatis merupakan sifat sistem atau kolektifitas, dan *ditandai oleh „ketidakhadiran subjek*. Mengkaji strukturasi suatu sistem sosial berarti mengkaji cara-cara untuk memproduksi dan mereproduksi sistem tersebut

didalam interaksi melalui penerapan aturan dan sumber umum dan di dalam konteks hasilhasil yang tidak dikehendakai. Giddens memaknai struktur sebagai aturan dan sumber yang disusun sebagai sifat-sifat sistem sosial.

Struktur hanya hadir sebagai „sifat-sifat struktural“. Sistem merupakan relasi yang direproduksi diantara aktor atau anggota kolektif, yang disusun sebagai Praktek sosial yang teratur. Dan strukturasi merupakan aneka kondisi yang memengaruhi kontinuitas atau transformasi struktur dalam reproduksi sistem (Giddens, 1979:114-115). Giddens perlu membedakan penggunaan antara struktur dengan sistem (Giddens, 1979:xv). Sebab, dalam kalangan fungsionalis, struktur dan sistem sering kali dipertukarkan dalam penggunaannya. Sistem lebih merujuk kepada pengertian „struktur“ dalam pandangan Durkheim.

Struktur terlibat secara terus menerus dalam reproduksi sosial; unsur- unsur terlembagakan sistem sosial memiliki kelengkapan- \kelengkapan kelengkapan struktural. Kelengkapan struktural dalam pengertian bahwa hubungan-hubungan distabilisasikan di sepanjang masa dan ruang. Sistem sosial, berbeda dengan struktur, hadir di dalam ruang dan waktu, dan dibentuk oleh Praktek-Praktek sosial. Konsep sistem sosial, yang dipahami dalam pengertian terluasnya, merujuk pada *ketergantungan timbal balik aksi* hasil reproduksi; dengan kata lain, merujuk pada suatu „hubungan yang perubahan pada satu atau lebih komponen anggotanya dapat memicu perubahan pada komponen anggota lainnya, dan perubahan ini pada gilirannya menghasilkan perubahan terhadap bagian-bagian yang menjadi tempat berlangsungnya perubahan awal (Giddens, 1979:129)

Dalam upaya menitikberatkan pentingnya sumber daya sebagai sifat- sifat struktural sistem sosial, Giddens menekankan keutamaan konsep kekuasaan bagi teori sosial. Kekuasaan dimaknai kemampuan (a) aktor mewujudkan keinginannya, bahkan dengan mengorbankan keinginan/kepentingan orang lain yang boleh jadi menentanginya, (b) kekuasaan dipandang sebagai milik bersama (kolektivitas). (Giddens, 1979:119-120). Bagi Giddens, cara pandang kekuasaan seperti itu tidak tepat jika dipisah-pisahkan. Giddens memandang keduanya sebagai ciri-ciri *dualitas struktur*. Giddens memperlakukan sumber daya sebagai „landasan” atau „kendaraan”, yang digali oleh para pihak dari dan untuk interaksi serta direproduksi melalui dualitas struktur. Kekuasaan dimunculkan oleh bentuk- bentuk pasti dominasi secara sejajar dengan keterlibatan aturan dalam Praktek sosial (Giddens, 1979:121)

Giddens membedakan „institusi” dengan „sistem sosial” atau kolektivitas. Institusi dipandang sebagai „pola baku perilaku” yang memainkan peran dasar dalam penciptaan ruang dan waktu sistem sosial. Standarisasi perilaku dalam ruang- waktu mencakup rekontruksi terus menerus dalam konteks potensial aktivitas sosial sehari-hari. Temporalitas memasuki reproduksi sistem sosial melalui tiga cara (a) dalam jalinan interaksi langsung, (b) dalam reproduksi anggota sistem sosial, dan (c) dalam reproduksi institusi (Giddens, 1979:180-181). Institusi tidak semata- mata berfungsi „dibelakang” para aktor sosial yang memproduksi dan mereproduksinya. Setiap anggota masyarakat yang berkompeten sangat mengenal institusi masyarakat sendiri; pengetahuan semacam itu tidak bersifat *kebetulan* akibat berfungsinya masyarakat, namun secara otomatis ikut aktif didalamnya (Giddens, 1979:125). Garis yang menghubungkan signifikansi-dominasi-legitimasi bukanlah hubungan sebab akibat, namun semata-mata menunjukkan ketergantungan timbal balik. Giddens membagi 3

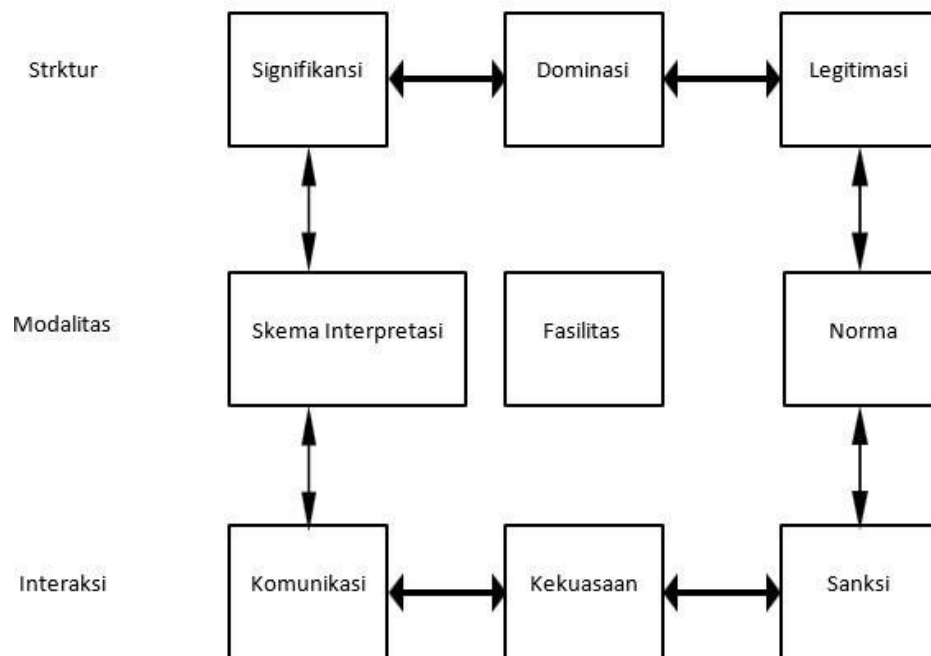
jenis institusi, yaitu institusi simbolik, politik, dan ekonomi (Giddens, 1979:199). Dualitas struktur merupakan landasan utama bagi keterulangan keterulangan dalam reproduksi sosial di sepanjang ruang dan waktu. Pada gilirannya, hal ini mempersyaratkan kemampuan introspeksi dan mawas diri (*reflexive monitoring*) dari para agen di dalam, dan sebagai bentuk, *durée* aktivitas sosial sehari-hari (Giddens, 1984:43). Menurut gagasan dualitas struktur, aturan dan sumber daya diterapkan oleh para aktor dalam melakukan interaksi, namun sebagai konsekuensinya juga ditanamkan ulang melalui interaksi semacam itu. Dengan demikian, struktur merupakan pola yang digunakan oleh hubungan antara momen dengan totalitas untuk mengekspresikan dirinya dalam reproduksi sosial (Giddens, 1979:124).

Dualitas struktur memandang *struktur* dan agen berinteraksi dalam proses produksi dan mereproduksi institusi dan hubungan-hubungan sosial. Artinya, aktor merupakan hasil dari *struktur*, akan tetapi aktor juga menjadi mediasi bagi pembentukan *struktur* yang baru (Basrowi, 2004:122). Hubungan ini berbeda dengan hubungan yang ikut terlibat dalam relasi antara „bagian“ dengan „keseluruhan“ dalam mengorganisasikan para aktor dan kelompok dalam sistem sosial seperti yang terungkap dalam teori Fungsionalis. Artinya, perbedaan yang membentuk sistem sosial sesungguhnya merefleksikan dialektika antara kehadiran dan ketidakhadiran di dalam ruang dan waktu. Perbedaan hanya hadir dan direproduksi melalui tertib maya perbedaan struktur (*virtual order of differences of structure*) yang terungkap melalui dualitas struktur (Giddens, 1979:124).

Struktur, sebagai seperangkat aturan dan sumber daya yang terorganisasikan secara rutin, berada di luar ruang dan waktu, tersimpan dalam koordinasi dan instansiasinya dalam bentuk jejak-jejak ingatan, dan ditandai ketidakhadiran subjek.

Sebaliknya, sistem-sistem sosial yang secara rutin melibatkan struktur terdiri dari aktivitas-aktivitas tertentu para agen manusia, dan direproduksi sepanjang ruang dan waktu (Giddens, 1984:40). Menganalisis strukturasi dari sistem-sistem sosial berarti mempelajari bagaimana cara sistem-sistem seperti itu, yang tertanam dalam aktivitas-aktivitas aktor tertentu berpegang pada aturanaturan dan sumber daya-sumber daya dalam beragam konteks tindakan, diproduksi dan direproduksi dalam interaksi (Giddens, 1984:40). Komposisi antara agen dan struktur-struktur bukanlah dua perangkat terpisah, atau sebuah dualisme, melainkan mewakili sebuah dualitas. Menurut gagasan dualitas, kelengkapan-kelengkapan struktural sistem-sistem sosial adalah sarana sekaligus hasil dari Praktek-Praktek yang terorganisasi secara rutin. Struktur tidak berada „berada di luar” Individu; sebagai jejak-jejak ingatan dan ketika terwujudkan dalam Praktek-praktik sosial, struktur dalam pengertian tertentu „berada di dalam” bukannya di luar sebagaimana pengertian Durkheimian (Giddens, 1984:40-41). Konsentrasi terhadap analisis kelengkapan-kelengkapan struktural dari sistem sosial harus menjadi penekanan, dan menjadi prosedur yang valid jika ia menempatkan suatu *ephoce* terhadap- dengan menjaga kelenturannya-perilaku sosial yang dimonitor secara refleksif. Dibawah *ephoce* seperti itu, bisa dibedakan tiga dimensi struktural dalam sistem sosial signifikansi, dominasi, dan legitimasi (Giddens, 1984:49). Giddens menggambarkan relasi antara struktur dan tindakan sebagaimana :

Gambar : 2.2. Dualitas Struktur



Bagan 2.2. Dualitas Struktur

Modalitas strukturasi merepresentasikan dimensi utama dualitas struktur di dalam penciptaan interaksi. Modalitas strukturasi dimanfaatkan oleh para aktor untuk melakukan dan menciptakan interaksi, namun pada saat yang sama juga menjadi sarana untuk mereproduksi aneka komponen struktural sistem interaksi (Giddens, 1979:143). Ketika analisis institusional difokuskan, maka modalitas diperlakukan sebagai khazanah ilmu pengetahuan dan sumber daya yang dimanfaatkan oleh para aktor dalam melakukan interaksi sebagai prestasi yang menunjukkan kecakapan dan keahlian, di dalam kondisikondisi terbatas rasionalisasi tindakan (Giddens, 1979:143). Modalitas mengacu pada mediasi interaksi dan struktur dalam proses reproduksi sosial. Konsep dibaris pertama, merupakan karakterisasi struktur, sementara baris ketiga mengacu kepada properti interaksi.

Komunikasi makna dalam interaksi melibatkan penggunaan skema interpretasi yang dengan demikian pengertian *dibuat* oleh para partisipan dari apa yang setiap orang katakan dan lakukan (struktur signifikansi). Struktur signifikansi selalu harus dipahami dalam kaitannya dengan dominasi dan legitimasi. Pemahaman ini harus diarahkan pada pengaruh kuat kekuasaan dalam kehidupan sosial. „Dominasi“ dan „kekuasaan“ tidak bisa dipikirkan hanya dari sisi asimetris distribusi, melainkan harus dikenali sebagai tak terpisahkan dalam asiasi sosial (Giddens, 1984:51). Penerapan skema kognitif semacam itu, dalam sebuah kerangka pengetahuan bersama, bergantung pada dan ditarik dari sebuah tatanan kognitif yang didiami bersama-sama oleh masyarakat; namun ketika menggunakan tatanan kognitif itu, penerapan skema interpretatif pada saat bersamaan *menyusun* ulang tatanan itu.

Penggunaan kekuasaan dalam interaksi melibatkan aplikasi fasilitas yang digunakan para partisipan agar mampu memberikan hasil dengan memengaruhi perilaku orang lain; fasilitas ditarik dari sebuah tatanan dominasi dan pada saat bersamaan, saat tatatan itu diterapkan; mereproduksi tatatan dominasi (struktur dominasi). Dan Akhirnya, penyusunan moral atas iteraksi melibatkan penerapan norma yang diambil dari suatu tatanan yang sah, tetapi dengan aplikasi itu juga menyusun ulang-ulang tatananyang bersangkutan (struktur legitimasi). Seperti halnya komunikasi, kekuasaan dan moralitas juga merupakan elemen integral dari interaksi, sehingga signifikansi (pengertian), dominasi dan legitimasi hanya secara analitis merupakan properti terpisah dari struktur. Struktur pengertian dapat dianalisis sebagai kaidah semantik, struktur dominasi sebagai sistem sumber- sumber, struktur legitimasi sebagai sistem kaidah moral (Giddens,1993:172-173). Komunikasi makna didalam interaksi tidak berlangsung secara terpisah dari pelaksanaan atau operasionalisasi relasi kekuasaan, atau diluar konteks-konteks sanksi- sanksi normatif (Giddens, 1979:144).

Struktur tidak memiliki eksistensi yang terpisah dari pengetahuan agen tentang apa yang mereka lakukan dalam aktivitas keseharian mereka. Para agen manusia selalu mengetahui apa yang sedang mereka lakukan pada tataran kesadaran diskursif melalui sebuah deskripsi. Namun demikian, apa yang agen lakukan bisa saja asing menurut deskripsi- deskripsi lain, dan mereka mungkin tidak banyak tahu tentang berbagai konsekuensi dari aktivitas-aktivitas yang sedang mereka lakukan (Giddens, 1984:42-43). Namun demikian, pengetahuan manusia selalu terbatas. Arus tindakan terus melahirkan konsekuensi konsekuensi yang tidak disengaja oleh para aktor, dan konsekuensi tidak disengaja ini juga membentuk kondisi-kondisi tak terkenali dari tindakan tindakan melalui cara umpan balik (Giddens,1984:43).

2.6. Monitoring Refleksif Tindakan

Sebagaimana tidak seluruh tindakan memiliki tujuan, dalam arti memiliki maksud yang jelas seperti terdapat dalam pikiran sang agen, tepi kebanyakan tindakan mengandung tujuan, artinya tindakan tersebut dibawah pantauan sang pelaku yang secara terus menerus mengukur apa yang sedang mereka lakukan, bagaimana orang lain melakukan reaksi terhadap apa yang mereka lakukan. Hal ini penting dari pemantauan tidak sengaja (*reflexive monitoring*) terhadap suatu tindakan adalah kemampuan sang agen untuk menjelaskan, baik kepada dirinya maupun kepada orang lain, serta alasan mengapa mereka bertindak sesuai dengan pemberian alasan-alasan terhadap tindakan tersebut (Thompson, 1984:240). Pengawasan refleksif terhadap perilaku berfungsi berdasarkan latar belakang rasionalisasi tindakan (yang dimaknai Giddens sebagai kemampuan pelaku manusia untuk „menjelaskan“ alasan atas perilakunya) dan dalam konteks kesadaran praktis

yang lebih inklusif. Pengawasan refleksif terhadap aksi meliputi pengawasan terhadap *setting* interaksi yang tidak hanya berupa perilaku dari aktor-aktor tertentu secara terpisah. Rasionalisasi aksi, sebagai sifat berulang perilaku sehari-hari, merupakan karakteristik norma perilaku para pelaku sosial berkompeten, dan benar-benar menjadi landasan utama bagi orang-orang lain untuk menilai „kompetensi” mereka (Giddens, 1979:96-98).

Dalam hal tindakan, Giddens membedakan antara „pilihan” (*option*) dan „pilihan yang mungkin” (*feasible option*). Seorang individu yang memiliki satu pilihan bukanlah seorang agen, karena itu tidak dapat dikatakan bahwa individu itu „melakukan sebaliknya”. Tetapi, seorang individu memiliki satu pilihan yang mungkin, ia adalah seorang agen, karena pilihan tinggal satu dalam artian bahwa keinginan dan hasrat yang dimiliki individu tersebut hanya satu yang memungkinkannya dilihat sebagai agen yang layak untuk bertahan (Thompson, 1984:267). Para aktor manusia tidak hanya mampu memonitor aktivitas-aktivitas mereka sendiri dan aktivitas aktivitas orang lain dalam perulangan perilaku sehari-hari; mereka juga mampu „memonitor monitoring itu dalam kesadaran diskursif. „Skema interpretatif” adalah cara penjenisan yang tersimpan dalam gudang pengetahuan para aktor, dan diterapkan secara refleksif ketika melangsungkan komunikasi.

Bekal pengetahuan yang para aktor gunakan dalam produksi dan reproduksi interaksi sama seperti bekal pengetahuan yang membuat mereka mampu menciptakan cerita-cerita, mengemukakan alasan-alasan, dan lain sebagainya (Giddens, 1984:47). Tindakan (*action*), bagi Giddens, harus dipahami sebagai aliran intervensi yang terus menerus di dunia ini yang dilakukan oleh agen-agen otonom. Tindakan harus dibedakan dari “bertindak” (*acts*). Bertindak adalah bagian-bagian

tertentu suatu tindakan sebagai gambaran dari aliran yang terus menerus tersebut dalam melakukan proses kategorisasi dan deskripsi secara nyata (Thompson, 1984:241). Kebanyakan tindakan mengandung tujuan, artinya tindakan tersebut dibawah pantauan sang pelaku secara terus menerus mengukur apa yang sedang mereka lakukan, bagaimana orang lain melakukan reaksi terhadap apa yang sedang mereka lakukan dan bagaimana keadaan saat tindakan itu dilakukan (Thompson, 1984:241). Tindakan disengaja tidak tersusun atas gabungan atau sekumpulan maksud, alasan, dan motif terpisah (Giddens, 1984:4). Apa yang disebut dengan cara stratifikasi dari sisi pelaku melibatkan pembicaraan tentang monitoring reflektif, rasionalisasi, dan motivasi tindakan sebagai sederet proses yang melekat (Giddens, 1984:5).

Rasioanalitas tindakan merujuk kepada „kesengajaan“ (*intentionality*) sebagai proses, adalah karakteristik rutin perilaku manusia dalam cara yang biasa (Giddens, 1984:5). Rasionalitas tindakan, dalam keanekaragaman keadaan interaksi, merupakan basis utama bagi orang lain dalam mengevaluasi „kompetensi“ umum para aktor (Giddens, 1984:5). Para aktor merasionalisasi dunia mereka dalam usaha mendapatkan rasa aman.

Rasionalisasi ialah perkembangan rutinitas yang tidak hanya memberi rasa aman bagi para aktor, tetapi juga memungkinkan mereka menangani kehidupan sosialnya secara efisien. Para aktor juga mempunyai motivasi untuk bertindak, dan motivasi-motivasi itu meliputi keinginan dan hasrat mendorong tindakan, oleh karena itu, meskipun rasionalisasi dan refleksitas senantiasa terlibat di dalam tindakan, motivasi itu dianggap sebagai potensi tindakan (Ritzer, 2012:890-891).

Muatan purposif dari tindakan sehari-hari tercakup dalam pengawasan sukses tanpa henti oleh aktor tentang aktivitasnya sendiri, hal ini mengindikasikan sebuah pengawasan sambil lalu atas rangkaian kejadian sehari-hari yang biasa tidak dipertanyakan aktor. Menyelidiki tujuan aktor atas apa yang dia lakukan berarti menyelidiki keterlibatannya dalam rangkaian kejadian dan mempertanyakan (Giddens,1993:106).

Menanyakan alasan sebuah tindakan berarti secara konseptual memotong aliran tindakan, yang tidak melibatkan rangkaian diluar dawai alasan yang berlainan. Menyelidiki rasionalisasi tingkah laku semacam itu, menurut Giddens adalah menyelidiki (a) hubungan logis antara beragam bentuk tindakan, atau proyek purposif, dan (b) „landasan teknis” dari pengetahuan yang diterapkan sebagai „alat” dalam tindakan purposif untuk megamankan hasil tertentu (Giddens,1993:107).

Agar aktivitas seseorang „dapat dipertanggungjawabkan”, berarti orang-orang itu harus menjelaskan alasan-alasan dan memberikan landasan normatif yang „membenarkan” aktivitas tersebut. Unsur-unsur normatif dalam interaksi selalu berpusat pada relasi-relasi antara hak dan kewajiban yang „diharapkan” dari mereka dan ikut andil dalam rangkaian konteks interaksi (Giddens, 1984:48).

Ambiguitas atau pengaburan antara perilaku yang dianggap sebagai tanggungjawab agen sendiri, dan ole karenanya potensial ditanya untuk pembedaannya, dan perilaku yang dianggap „diluar tanggungjawab mereka” memungkinkan adanya beragam bentuk manuver atau kebohongan yang digunakan orang untuk mencari jalan keluar dari sanksi atas apa yang mereka lakukan, atau sebaliknya mengklaim hasil tertentu sebagai pencapaian mereka sendiri (Giddens,1993:89).

Dislokasi tujuan dari agensi bisa ditunjukkan dalam dua cara; bahwa agen mungkin mencapai maksudnya, apa yang disengaja mereka lakukan, tetapi tidak melalui agensi mereka; dan bahwa tindakan sengaja membawa rangkaian konsekuensi, yang cukup sah dianggap sebagai perbuatan aktor, tetapi sebenarnya tidak sengaja mereka lakukan (Giddens, 1993:97-98).

Giddens mendefinisikan „punya maksud” dan „punya tujuan” sebagai semua tindakan dimana agen yang tahu bisa diharapkan untuk menunjukkan kualitas atau hasil tertentu, dan dimana pengetahuan ini dipergunakan oleh aktor untuk memproduksi kualitas atau hasil itu. Penjelasannya sebagai berikut: (a) karena tindakan memiliki maksud, agen tidak harus mampu merumuskan pengetahuan yang mereka terapkan sebagai dalil abstrak juga perkara „pengetahuan” itu tidak harus valid, (b) tujuan pastinya tidak dibatasi pada tindakan manusia (Giddens, 1993:97). Untuk memahami secara konseptual proses-proses produksi termonitor, harus dilakukan pembedaan- pembedaan tertentu yang sesuai dengan „apa sebenarnya” sistem-sistem sosial sebagai Praktek-Praktek yang direproduksi dalam latar interaksi. Setiap sistem sosial mempunyai derajat „kerengagangan” dan „perembesan” yang berbeda. Ini bisa dikenali engan dua hal, pertama adalah sarana yang umumnya sangat menonjol dalam fungsionalisme, dimana kesalingketergantungan dipahami sebagai proses homeostatis yang menyerupai mekanisme regulasi diri yang bekerja dalam organisme (Giddens, 1984:44). Proses bekerjanya teori Strukturasi dibagankan dengan model seperti pada:

Gambar : 2.3 Model Teori Struktural



Bagan 2. 3 Model Teori Struktural

2.7. Teori Struktural-Konstruktif

Pemikiran Bourdieu telah membuka tradisi baru dalam pemikiran ilmu sosial humaniora. Bourdieu (1990) memposisikan dirinya dalam upaya mendamaikan “oposisi *absurd* antara individu dan masyarakat”. Untuk mengatasi pertentangan ini, Bourdieu memilih menggunakan cara berpikir rasional, bahwa struktur objektif dan

representasi subjektif, agen dan pelaku terjalin secara dialektis dan saling mempengaruhi secara timbal-balik (*dualitas*). Keduanya tidak saling menafikan, tapi saling berpaut dalam sebuah Praktek. Di samping model pendekatan Bourdieu, berkembang individualisme-metodelogi Raymond Boudon.

Dalam bukunya *La logique du sosial*, fenomena sosial apa pun merupakan produk tindakan-tindakan individual. Oleh karena itu, logika tindakan harus dicari pada sisi rasionalitas pelaku- pelakunya. Pendekatan seperti ini tidak jauh berbeda dari model ekonomi klasik. Konsep *habitus* pada Bourdieu tidak akan menerima pemisahan ketat antara pelaku sosial dan struktur-struktur yang melingkupinya.

Model kedua ialah aksionalisme Alain Touraine. Pendekatan ini mendasarkan pada analisis gerakan-gerakan sosial dan peran mereka dalam perubahan sosial. Dalam bukunya *Le retour de l'acteur*, Alain Touraine menekankan bahwa gerakan-gerakan sosial merupakan objek khas dan masalah sentral analisis sosiologi. Ia membedakan konsep gerakan sosial dari konsep perjuangan kelas dan dari perilaku kolektif. Pembedaan ini didasarkan pada pemahamannya bahwa ada tiga tipe konflik. Kecenderungan ini berbeda dengan pendekatan Bourdieu yang memperhitungkan bahwa posisi-posisi pelaku juga terkait dengan ruang dan memang riil ditempati. Model ketiga ialah pendekatan strategis dari Michel Crozier, yang menekankan analisis hubungan-hubungan kekuasaan dan organisasi organisasi. Para pelaku sosial yang sekaligus rasional dan rasionalitasnya sebatas mempunyai makna kebebasan yang menjadi dasar kekuasaan mereka. Dalam bukunya yang ditulis bersama Erhard Friedberg, *L'acteur et le system*, Crozier mencoba menjelaskan dialetika antara pelaku dan sistem: struktur- struktur sosial hanya bisa diciptakan, dilanggengkan dan diubah oleh pelaku- pelaku sosial; sebaliknya pelaku sosial kendati dikatakan bebas,

dikondisikan oleh struktur-struktur tersebut. Dimensi dualitas pelaku dan struktur masih sangat kuat. Berbeda dengan Bourdieu, ada upaya penyatuan kedua unsur tersebut, oleh karena itu pendekatannya disebut strukturalisme genetis Ritzer dan Goodman (2009: 579-580). Analisis struktur-struktur objektif yang tidak bisa dipisahkan dari analisis asal-usul struktur-struktur mental dalam individu-individu biologis yang sebagian merupakan produk penyatuan struktur-struktur sosial dan asal-usul struktur sosial itu sendiri. Pendekatan ini membuka cakrawala dalam menganalisis masyarakat sehingga memberi sumbangan khas.

Berdasarkan ketiga model pendekatan di atas, dapat dikatakan bahwa Bourdieu menawarkan tiga perspektif yang segar (atau boleh dikatakan baru) dalam memahami masyarakat. *Pertama*, penggunaan konsep *habitus* dianggap berhasil mengatasi masalah dikotomi individu-masyarakat, agen-struktur sosial, kebebasan-determinisme. *Kedua*, Bourdieu mencoba membongkar mekanisme dan strategi dominasi.

Menurutnya, dominasi tidak lagi diamati melulu dari akibat-akibat luar, tetapi juga akibat yang dibatinkan (*habitus*). Dengan menyingkap mekanisme tersebut kepada pelaku sosial, sosiologi memberi argumen yang dapat menggerakkan tindakan politik. Perubahan politik dan sosial lalu bisa dipahami sebagai bertemunya upaya dari diri dan tindakan kolektif (Fashri, 2007: 81-93). *Ketiga*, Bourdieu menjelaskan logika praksis pelaku-pelaku sosial dalam lingkup sosial yang tidak setara dan konflikual. Logika ini mengatasi model Marxis yang hanya berhenti pada penjelasan masyarakat yang dikatakan menjadi infrastruktur ekonomi. Dia mengemukakan pandangan bahwa lingkup sosial dibentuk dari beragam ranah yang otonom, (budaya, politik, gender, seni, dan tidak hanya ekonomi) yang mendefinisikan model-model dominasi dalam

masyarakat.

Perkakas utama Bourdieu dalam memahami masyarakat adalah terletak pada konsep *habitus and field*, juga strategi untuk mencapai dan mempertahankan kekuasaan. Membahas *habitus* secara memadai mengandaikan suatu bentuk epistemologi sejarah dalam arti mengungkap relevansi praktis suatu wacana (Takwin, 2006: 35-54).

Konsep ini sebenarnya berasal dari tradisi pemikiran filsafat, bukan merupakan ciptaan asli Bourdieu. Dalam bahasa Latin, *habitus* bisa berarti kebiasaan (*habitual*), penampilan diri (*appearance*), atau bisa pula merujuk pada tata pembawaan yang terkait dengan kondisi tipikal tubuh. Selain itu, istilah *habitus* juga menunjukan aspek perlengkapan bagi substansi tertentu, seperti yang ditemukan dalam pemikiran Aristoteles mengenai pembagian ada (*being*).

Ritzer menguraikan konsep *habitus* Bourdieu, juga mengungkapkan *habitus* sebagai “akal sehat” (*common sense*) yang merefleksikan pembagian objektif dalam struktur kelas seperti kelompok usia, jenis kelamin, dan kelas sosial. Dalam hal ini, *habitus* bisa jadi merupakan fenomena kolektif, dia memungkinkan orang untuk memahami dunia sosial, namun keberadaan berbagai *habitus* berarti bahwa dunia sosial dan strukturnya tidak menancapkan dirinya secara seragam pada setiap aktor.

Dengan demikian *habitus* memungkinkan dibangunnya teori produksi sosial pelaku dan logika tindakan, ia merupakan faktor penjelasan logika berfungsinya masyarakat. Dalam perspektif ini, sosialisasi menjadi bentuk pengintegrasian *habitus* kelas. Ia menghasilkan kepemilikan individu pada kelas dengan mereproduksi kelas sebagai kelompok yang memiliki kesamaan *habitus*. Haryatmoko, yang mengutip Bourdieu mengatakan bahwa “setiap sistem disposisi individu adalah variabel

struktural sistem disposisi yang lain, dimana terungkap kekhasan posisinya di dalam kelas dan arah yang dituju. Gaya pribadi, Praktek-Praktek kehidupan atau hasil karya, tidak lain kecuali suatu jarak terhadap gaya khas suatu zaman atau suatu kelas, sehingga gaya itu mengacu pada gaya umum, tidak hanya melakukan keseragaman, tetapi juga melalui perbedaan yang menghasilkan pembawaan tertentu”.

Pierre Bourdieu mendefinisikan *habitus* sebagai pengkondisian yang dikaitkan dengan syarat-syarat keberadaan suatu kelas. Menurutnya sistem- sistem disposisi tahan waktu dan dapat diwariskan, struktur-struktur yang dibentuk, yang kemudian akan berfungsi juga sebagai struktur-struktur yang membentuk adalah merupakan hasil dari suatu *habitus*. Dengan demikian, *habitus* adalah merupakan hasil ketrampilan yang menjadi tindakan praktis (tidak selalu disadari) yang kemudian diterjemahkan menjadi suatu kemampuan yang kelihatannya alamiah dan berkembang dalam lingkungan sosial tertentu. Bourdieu mencontohkan dalam hal penguasaan bahasa, penulisan atau pemikiran.

Seniman, sastrawan, penulis atau pemikir dikatakan mampu menciptakan karya-karya mereka berkat kebebasan kreatifnya karena mereka tidak lagi menyadari tanda-tanda atau gaya yang sudah mereka integrasikan ke dalam dirinya. Apa yang dipercaya sebagai kebebasan kreatif sebetulnya merupakan buah pembatasan struktur-struktur. Jadi *habitus* menjadi sumber penggerak tindakan, pemikiran dan representasi.

Selain itu, *habitus* juga dipahami sebagai dasar kepribadian individu. Pembentukan dan berfungsinya *habitus* seperti lingkaran yang tidak diketahui ujung-pangkalnya. Di satu sisi sangat memperhitungkan hasil dari keteraturan perilaku dan di lain sisi modalitas Prakteknya mengandalkan pada improvisasi dan bukan pada

kepatuhan aturanaturan. *Habitus* juga merupakan struktur intern yang selalu dalam proses restrukturisasi, jadi praktek dan repesintasi tidak sepenuhnya deterministik (pelaku bisa memilih), namun juga tidak sepenuhnya bebas (pilihannya ditentukan oleh *habitus*).

Habitus didefenisikan sebagai seperangkat skema (tatanan) yang memungkinkan agen-agen menghasilkan keberpihakannya kepada praktek- praktek yang telah diadaptasi atau disesuaikan dengan perubahan situasi yang terus terjadi (Burke, 2001: 179-181). Habitus juga didefenisikan sebagai struktur mental atau kognitif yang digunakan aktor untuk menghadapi kehidupan sosial. Habitus dibayangkan sebagai struktur sosial yang diinternalisasikan yang diwujudkan. Sebagai contohnya, kebiasaan makan dengan menggunakan tangan kanan, yang dipelajari seseorang sejak kecil dari orang-orang yang ada disekitarnya, sehingga terbawa sampai ia dewasa, karena kebiasaan tersebut sudah ia internalisasikan dalam dirinya. Sebagai contoh lainnya, yaitu kebiasaan seseorang berjalan di sebelah kiri pada jalan umum dan raya, dikarenakan peraturan lalu-lintas, dimana hal itu merupakan peraturan dalam kehidupan sosial yang harus ditaati, karena ketaatan dari individu tersebut, hal yang tadinya merupakan peraturan menjadi kebiasaan karena sudah terinternalisasi dalam diri setiap individu. Sehingga dapat dikatakan bahwa *habitus* adalah struktur sosial yang diinternalisasi sehingga menjadi suatu kebiasaan yang terus diwujudkan.

Habitus yang ada pada waktu tertentu merupakan hasil ciptaan kehidupan kolektif yang berlangsung selama periode histories yang relative panjang. Habitus menghasilkan, dan dihasilkan oleh kehidupan sosial. Dan tindakanlah yang mengantarai *habitus* dan kehidupan sosial. Menurut Bourdieu, *habitus* semata-mata “mengusulkan” apa yang sebaiknya dipikirkan orang dan apa yang sebaiknya mereka

pilih untuk sebaiknya dilakukan (Ritzer dan Goodman, 2003: 523-524). Seperti halnya makan, minum, berbicara, dan lain sebagainya.

Bourdieu menolak model kelas sosial seperti Marx, hanya terdiri dari dua kelas; bourgeois dan proletar ditentukan dengan pemilikan produksi. Bourdieu menolak kelas sosial direduksi hanya sebagai masalah ekonomi atau hubungan produksi, melainkan didefinisikan oleh habitus (Ritzer dan Goodman, 2012: 587). Habitus mahasiswa aktif bertanya dan menjawab pertanyaan dosen atau sedang diskusi (ranah) di kelas. Lebih tinggi kelas sosialnya daripada mahasiswa pasif tidak bertanya dan menjawab pertanyaan dosen. Disini lah kelas sosial bergantung kepada habitus, bukan pemilikan produksi. Selera menjadi pengatur pertandingan di ranah. Karena selera mahasiswa aktif adalah membaca buku-buku ilmiah yang menjadi habitusnya, sedangkan selera mahasiswa pasif adalah tidak suka membaca buku atau membaca buku komik. Dengan demikian, mengapa kelas sosial mahasiswa aktif lebih tinggi dari pada mahasiswa pasif. Karena memang selera dia menentukan kapital budaya (pengetahuan), juga menentukan habitus. Selera, kapital, habitus, kelas sosial dan ranah, dialektis satu sama lain.

Aspek menarik dari karya Bourdieu adalah bagaimana gagasan-gagasannya terbangun dalam dialog yang terus berlanjut, kadangkadang eksplisit dan kadang-kadang implisit, dengan gagasan-gagasan lainnya. Gagasan-gagasannya cukup dipengaruhi oleh dua pemikir terkemuka dimasa ia belajar yaitu, Jean Paul Sartre dan Claude LeviStrauss. Dari eksistensialisme Sartre, Bourdieu belajar tentang pemahaman yang begitu kuat bahwa aktor sebagai pencipta dunia sosial mereka. Namun dia merasa bahwa Sartre melangkah terlalu jauh dalam menempatkan kekuasaan pada aktor dan dalam prosesnya mengabaikan hambatan-

hambatan struktural. Lewat perspektif struktur ini, dia kemudian berpaling ke karya strukturalis Levi-Strauss. Dia tertarik pada orientasinya; sebaliknya, pada saat itu ia menggambarkan dirinya sebagai “strukturalis lugu” (Jenkins, 1992: 17). Namun beberapa penelitian Awalnya membawanya pada kesimpulan bahwa strukturalisme membatasi, kendati dengan arah berbeda, sebagaimana eksistensialisme.

Bourdieu mendefinisikan salah satu tujuan dasarnya sebagai reaksi atas eksis strukturalisme: “saya berniat untuk mengembalikan aktor di dunia nyata yang telah sirna di tangan Levi-Strauss dan para strukturalis lain...yang memandang aktor sebagai epifenomena struktur”. Dengan kata lain, Bourdieu ingin mengintegrasikan eksistensialisme Sartre dengan strukturalisme Levi-Strauss. Dalam hal fakta sosial, Bourdieu juga cukup dipengaruhi oleh Durkheim. Ia menempatkan Saussure, Levi-Straus, Durkheim dan Marxis dalam kelompok objektivis, sekaligus mengkritik mereka, karena baginya tokoh-tokoh tersebut mengabaikan proses konstruksi sosial yang digunakan aktor untuk memersepsi, memikirkan dan mengonstruksi struktur-struktur ini dan selanjutnya mulai bertindak atas dasar tersebut.

Selain itu, Marx dan Althuser juga cukup mempengaruhi Bourdieu dalam perspektif ideologi, namun ia kemudian melakukan berbagai modifikasi, sekaligus kritik terhadapnya. Dalam perspektif ideologi, Bourdieu menghindari penggunaan kata tersebut, dan mengusulkan konsep Doxa, yang pengertiannya menyerupai ideologi. Doxa adalah sejenis tatanan sosial dalam diri individu yang stabil dan terikat pada tradisi serta terdapat kekuasaan yang sepenuhnya ternaturalisasi dan tidak dipertanyakan (Takwin, 2003: 113-115). Dalam praktek kongkritnya, doxa tampil lewat pengetahuan-pengertian yang begitu saja diterima sesuai dengan habitus dan field

tanpa dipikir atau ditimbang lebih dahulu.

Selain itu, habitus juga dipahami sebagai dasar kepribadian individu. Pembentukan dan berfungsinya habitus seperti lingkaran yang tidak diketahui ujung-pangkalnya. Di satu sisi sangat memperhitungkan hasil dari keteraturan perilaku dan di lain sisi modalitas Prakteknya mengandalkan pada improvisasi dan bukan pada kepatuhan aturanaturan. Habitus juga merupakan struktur intern yang selalu dalam proses restrukturisasi, jadi Praktek dan represintasi tidak sepenuhnya deterministik (pelaku bisa memilih), namun juga tidak sepenuhnya bebas (pilihannya ditentukan oleh habitus). "Hal ini tampak dari pilihan terhadap tempat, peristiwa, orang yang dapat dikunjungi, habitus cenderung melindungi diri terhadap krisis dan dari yang mempertanyakan secara kritis dengan menjamin diri dalam lingkungan yang sedapat mungkin sudah disesuaikan, artinya dunia yang cukup stabil yang akan semakin memperteguh disposisi-disposisinya.

Hal ini menunjukkan bahwa realitas masyarakat yang terdiferensiasi itu, lingkup hubungan-hubungan objektif mempunyai kekhasan yang tidak bisa begitu saja tereduksi pada hubungan yang mengatur bidang lain. Karena itu, pemikiran Bourdieu yang mengatakan bahwa dalam semua masyarakat ada yang menguasai dan dikuasai, menjadi bermakna. Dalam pembedaan ini terletak prinsip dasar pengorganisasian sosial. Namun, menurutnya dominasi ini sangat tergantung pada situasi, sumber daya, dan strategi pelaku.

Dalam penjelasan pada bagian awal, telah disinggung bahwa habitus mendasari terbentuknya ranah, sementara dilain pihak ranah menjadi lokus bagi kinerja habitus. Ranah merupakan arena kekuatan yang di dalamnya terdapat upaya perjuangan untuk memperebutkan sumber daya (modal), dan juga demi memperoleh

akses tertentu yang dekat dengan hierarki kekuasaan. Istilah modal digunakan Bourdieu untuk memetakan hubungan- hubungan kekuasaan dalam masyarakat. Modal dalam perspektif ilmu ekonomi, memuat beberapa ciri penting, yaitu:

1. Modal terakumulasi melalui investasi;
2. Modal bisa diberikan kepada yang lain melalui warisan;
3. Modal dapat memberi keuntungan sesuai dengan kesempatan yang dimiliki oleh pemiliknya untuk mengoperasikan penempatannya (Haryatmoko. 2003).

Konsep “*modal*” meskipun merupakan khasanah ilmu ekonomi, namun dipakai Bourdieu karena beberapa cirinya yang mampu menjelaskan hubungan- hubungan kekuasaan, seperti yang telah disebutkan di atas. Berdasarkan hal itu, Bourdieu memberikan konstruksi teoritiknya terhadap modal sebagai berikut:

“Kapital adalah hubungan sosial, yaitu energi yang hanya ada dan hanya menghasilkan efek di bidang di mana ia diproduksi dan direproduksi, masing- masing sifat yang melekat pada kelas diberi nilai dan kemanjurannya oleh hukum spesifik di setiap bidang” (Fashri, 2007: 97).

Ide Bourdieu tentang modal seperti ini, lepas dari pemahaman tradisi Marxian dan juga konsep ekonomi formal. Konsep ini mencakup kemampuan melakukan kontrol terhadap masa depan diri sendiri dan orang lain. Pemetaan itu tidak berbentuk piramida atau tangga, tetapi lebih berupa suatu lingkup pembedaan atas dasar kepemilikan modalmodal dan komposisi modal-modal tersebut. Dengan pendekatan ini, maka setiap kelas sosial tidak dapat didefinisikan secara terpisah, tetapi selalu dalam hubungan dengan kelas-kelas lain.

Habitus yang sudah begitu kuat tertanam serta mengendap menjadi perilaku fisik disebutnya sebagai Hexis Hexis adalah perilaku fisik individu secara refleksi

otomatis yang sudah terlihat sebagai norma nilai yang berlaku.

Kapital sosial, budaya, simbolik tidak bisa direduksi dalam kapital ekonomi semata, karena setiap bentuk memiliki spesifikasi masing-masing. Akan tetapi pada akhirnya kapital ekonomi memang menjadi akar dari semuanya. Dengan kata lain setiap kapital akan mengalami transformasi atau konversi dari satu bentuk ke dalam bentuk lainnya.

Setiap kapital dalam konsep Bourdieu adalah berkaitan, juga bisa mengalami perubahan. Setiap individu bisa melampaui batasan-batasan kapitalnya (ekonomi), demi menaikkan kelas sosialnya di dunia sosial. Individu tersebut mempunyai modal budaya (menulis) dan modal simbolik (prestasi). Dengan mempunyai modal budaya dan simbolik, dapat menutupi modal ekonominya. Modal ekonomi akan individu dapat dengan usaha menjuarai suatu lomba tulisan, jika menang menjadi modal simbolik (prestasi). Modal simbolik ini lah yang membawa individu kepada modal sosial (jaringan sosialnya dengan penulis atau penerbit lain). Jadi, modal saling berkaitan satu sama lain, juga modal bisa berubah (meningkat) dan kelas sosial yang menggambarkan status sosial individu di masyarakat.

Di dalam dialektis selera, kapital, habitus, kelas sosial dan ranah terdapat distingsi, distingsi adalah preferensi estetis kelompok berbeda di dalam masyarakat. Antara artis dengan intelektual merupakan refleksi dari perjuangan tiada henti antara kelompok berbeda dari kelas dominan untuk mendefinisikan kebudayaan dan seluruh dunia sosial (Ritzer dan Goodman, 2012: 584). Artis dengan intelektual menggambarkan distingsi, karena mereka mempunyai ranah yang berbeda, serta selera dan habitus berbeda pula. Artis ranahnya di dunia hiburan, sedangkan intelektual ranahnya di dunia akademik. Artis seleranya menyanyi, melawak, atau

dugem. Intelektual tentunya seleranya membaca buku - buku ilmiah. Selera ini membawa kepada kelas sosial, yang ditentukan melalui ranahnya masing- masing (dunia hiburan dan dunia akademik).

Menurut Haryatmoko, para pelaku menempati posisi-posisi masing- masing yang ditentukan oleh dua dimensi: *pertama*, menurut besarnya modal yang dimiliki; dan *kedua*, sesuai dengan bobot komposisi keseluruhan modal mereka: “untuk memahami bahwa sistem kepemilikan yang sama (yang menentukan posisi di dalam arena perjuangan kelas) memiliki unsur yang dapat menjelaskan, apapun bidang yang dikaji, konsumsi makanan, Praktek prokreasi, opini politik atau Praktek keagamaan, dan bahwa bobot yang terkait dengan faktor-faktor yang membentuknya berbeda di satu arena dengan yang lain, dalam arena perjuangan yang satu mungkin modal budaya, ditempat lain mungkin modal ekonomi, arena lainnya lagi modal sosial, dan seterusnya.

2.7. Kerangka Konseptual

Penelitian ini secara esensial mengarah pada salah satu aspek paling penting dalam teori strukturasi Anthony Giddens yang menganalisis penggunaan aturan dan sumberdaya yang secara rekursif dilibatkan dalam institusi-institusi. Struktur bisa dikatakan sebagai pelengkap penjelasan mengenai agen. Struktur yang diamati dalam penelitian ini ialah terkait dengan sifat-sifat terstruktur yang mengikat ruang dan waktu dalam sistem sosial. Sifat-sifat ini mungkin menjadi Praktek sosial yang sama terlihat berlangsung melebihi rentang ruang waktu yang meminjamkan kepadanya dalam bentuk sistemik.

Selain itu, struktur merupakan keteraturan yang sebenarnya dari hubungan transformatif, yang berarti sistem sosial karena Praktek-praktik sosial yang

tereproduksi tidak memiliki struktur, tetapi lebih menunjukkan sifat-sifat struktural dan keberadaan struktur itu sebagai kehadiran ruang dan waktu, hanya dalam penggambarannya seperti pada praktik-praktik sosial dan sebagai memori yang menemukan arah pada perilaku agen manusia yang dapat dikenali dalam tiga gugus besar struktur. Pertama struktur penandaan atau *signifikansi* yang menyangkut sekamata simbolik, pemaknaan, penyebutan dan wacana dalam Praktek *Erau* di Kutai Kertanegara, Kedua, struktur penguasaan atau *dominasi* yang mencakup skemata penguasaan atas orang (politik) dan barang atau hal (ekonomi) oleh raja Kutai Kertanegara, Pemerintah, Tokoh Agama, Pemuka masyarakat Pemangku Adat terhadap masyarakat, dan Individu. Ketiga, struktur pembenaran (*legitimasi*) yang menyangkut skemata peraturan normativ yang terungkap dalam tata hukum yang mengatur jalannya upacara *Erau* untuk mengkondisikan perilaku pendukungnya.

Selain teori strukturasi Anthony Giddens, penelitian ini juga menggunakan teori struktural konstruktifis dari Pierre Bourdieu yang relevan untuk digunakan dalam mengkaji tentang fenomena *Erau* di Kutai Kertanegara.

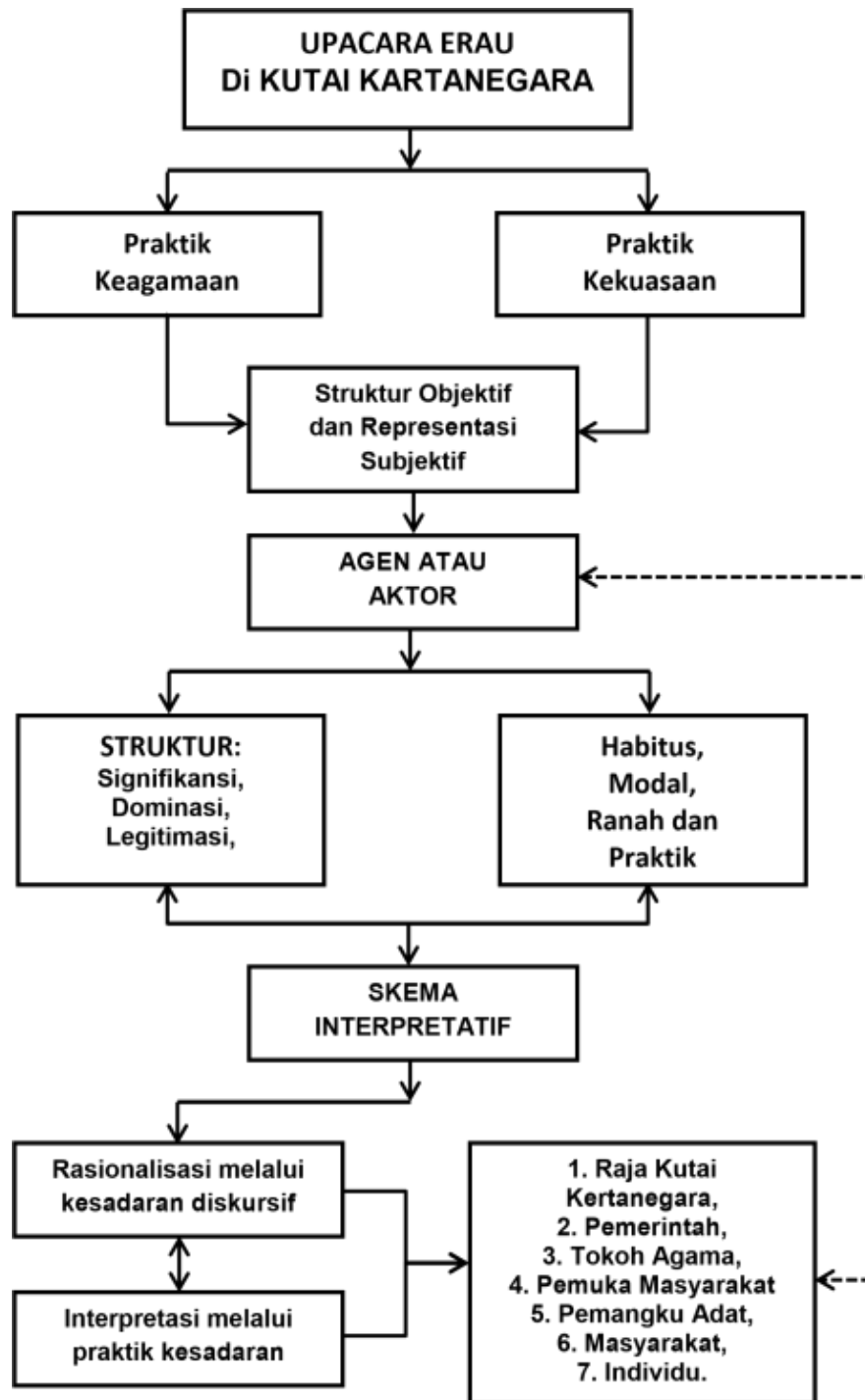
Pertama, habitus (struktur mental atau kognitif) yang dengannya orang berhubungan dengan dunia sosial. Dalam berhubungan dengan dunia sosial, semua yang berperan dalam Praktek *Erau* tidak terlepas dari interaksi dan ruang sosial. Untuk memenuhi syarat atau penerimaan secara sosial, Raja Kutai Kertanegara, Pemerintah, Tokoh Agama, Pemuka masyarakat Pemangku Adat harus mempunyai kapital dalam memenuhi interaksi dan ruang sosialnya dengan orang lain sekaligus menciptakan distingsi sebagai preferensi estetis kelompok agar berbeda di dalam masyarakat. Dengan demikian habitus memungkinkan dibangunnya teori produksi sosial pelaku

dan logika tindakan yang merupakan faktor penjelasan logika berfungsinya masyarakat.

Kedua, kapital dalam bentuk ekonomi, sosial, budaya dan simbolik) yang digunakan oleh pemilik kuasa sebagai “sekumpulan tenaga (dalam bentuk yang sudah termaterikan atau berwujud dalam bentuk tertentu) yang akan digunakan secara pribadi atau eksklusif (umpamanya dijadikan modal besar dasar atau agen-agen maupun sekelompok agen) yang memungkinkan menyediakan energi sosial untuk mendapatkan pengakuan dari masyarakat dan individu.

Ketiga, ranah sebagai tempat kompetisi antar aktor dalam upacara *Erau* untuk memenangkan kontestasi yang berkaitan dengan ekonomi, sosial, budaya dan simbolik sehingga diperlukan penggunaan elemen keempat yaitu *praktek* atau strategi untuk mempertahankan atau mengubah distribusi modal-modal dalam kaitannya dengan hirarkhi kekuasaan. Jika salah satu dari unsur kekuasaan (Raja Kutai Kertanegara, Pemerintah, Tokoh Agama, Pemuka masyarakat Pemangku Adat) dalam posisi dominan maka strateginya diarahkan pada usaha melestarikan dan mempertahankan status quo. Sedangkan mereka yang didominasi berusaha mengubah distribusi modal, aturan main dan posisi-posisnya sehingga terjadi kenaikan jenjang sosial.

Gambar : 2.4 Alur Pikir dan keterkaitan antar konsep



Gambar 2.4: Alur Pikir dan Keterkaitan Antar Konsep

2.7.1. Konsep *Erau*

Erau merupakan sebuah upacara tradisional yang pada setiap tahun dilaksanakan di Tenggarong, kota Kabupaten yang dahulu menjadi pusat kerajaan Kutai Kartanegara. Sebagai upacara tradisional, *Erau* telah dilaksanakan sejak kerajaan Kutai yang dimasa pemerintahan oleh Aji Batara Agung Dewa Sakti adalah raja pertama Kutai Kartanegara pada tahun 1300-1325 (D Adham, 1979). Ketika itu *Erau* dilaksanakan pada saat pelantikan raja, yang kemudian menjadi sebuah tradisi kerajaan Kutai untuk pelantikan raja-raja berikutnya maupun untuk event pemberian gelar bagi aparat kerajaan dan berjasa.

Erau berasal dari bahasa daerah Kutai dari kata "*Eroh*" yang berarti ramai,ribut, riuh dalam suasana yang penuh suka cita. Upacara ini juga bertujuan untuk memelas (tempong tawar) tanah, hutan dan air. Menurut kepercayaan pada waktu itu, upacara ini akan dapat memberikan kesejahteraan dan kebahagiaan kepada rakyat Kutai. Melalui *Erau* sawah dan ladang, sungai dan hutan-hutan akan menjadi subur dan akan memberikan penghasilan yang berlimpah (soeten, 1979). Bahkan sesungguhnya, *Erau* mempunyai arti simbolik dan filosofis yang melambangkan budaya tradisional, yakni *Erau* sebagai tanda syukur, keselamatan, ketentraman, kemakmuran, keadilan sosial, pembersihan jiwa dan persatuan. Intinya upacara *Erau* yang dilatarbelakangi oleh mitologi, berfungsi untuk mempertebal perasaan kolektif dan integrasi sosial. Dalam penelitian ini saya ingin melihat kecenderungan suatu

kelompok dalam masyarakat menyematkan stereotip terhadap kelompok lain dalam struktur masyarakat dengan media dalam suatu budaya upacara *Erau* sebagai suatu dinamika struktur masyarakat. Terkait penelitian yang akan saya lakukan sudah banyak studi tentang dinamika struktur atau kekuasaan yang sudah dilakukan oleh beberapa peneliti atau ahli antropologi Chabot (1950) yang menuliskan hubungan antara bangsawan (karaeng) yang selalu memiliki pengikut (Minawang) dan dapat melindungi rakyatnya dalam berbagai kebutuhan, dengan konsekuensi pengikut atau rakyat selalu patuh atas keinginan karaeng, dan sistem ini disebut patronase yang masih berlaku pada tahun 1950-an begitu pula dengan studi Millar (1981) mengenai pola hubungan status sosial masyarakat Bugis yang naik turun dengan menggunakan media pernikahan ruang negosiasi. Standar orang Bugis dalam menentukan status kedudukan sosial dapat berubah mengikuti perubahan gaya hidup dan wawasan orang-orang berstatus sosial tinggi.

Kemudian Errington (1989) menulis tentang kekuatan politik pada zaman dahulu kerajaan Luwuq, menyatakan bahwa untuk meningkatkan pengaruh seorang bangsawan memerlukan keluarga besar, sanak saudara, istri atau suami menjadi semacam pengikut, seperti halnya sanak saudara istri ayahnya atau kakaknya. Perkawinan dapat dipandang sebagai sebuah strategis. Untuk memperoleh pengikut. Sebagaimana halnya studi yang dilakukan Thahara (2014) menjelaskan dinamika struktur antar lapis sosial dalam

struktur masyarakat Buton dengan menghadirkan wacana status tradisional masa kesultanan Buton yang diproduksi terus menerus dalam berbagai situasi sosial.

Menurut peneliti, beberapa etnografi yang disebutkan diatas dapat dijadikan sebagai bahan komparatif untuk melihat pola hubungan yang terjadi antar kelompok-kelompok sosial pada masyarakat Kutai Kartanegara berdasarkan status tradisional dan bagaimana memahami dunia sosial antar kelompok berdasarkan perubahan status yang menimbulkan stereotip.

Gilles dalam Gidden (2003) membuktikan bahwa pertama; stereotipe merupakan hasil dari kecendeungan mengagung-agungkan atau membesar-besarkan tingkat asosiasi antara keanggotaan kelompok. Kedua, mempengaruhi cara kita memproses informasi. Kita cenderung mengingat informasi menyangkut ingroup dan cenderung mengabaikan dan mengintai informasi yang jelek menyangkut out group. Ketiga, stereotip memaksa pola-pola komunikasi orang lain dan memperteguh komunikasi mereka. Selain itu Verdeber dalam Lliweri dalam Giddens (2003) menyebutkan stereotip sebagai sikap dan bahkan karakter yang dimiliki seseorang untuk menilai orang semata-mata untuk berdasarkan pengelompokan yang dibuat dan berlaku secara turun temurun dan dimiliki secara bersama dalam suatu komunitas. Dalam hal ini stereotip menciptakan pemenuhan terhadap dugaan-dugaan diri dan cenderung memperhatikan perilaku yang membuat dugaan kita. Thahara (2014)

menyebutkan stereotip diproduksi dalam berbagai kesempatan sebagai strategi mempertahankan posisinya sebagai kelompok sosial lapisan atas.

2. 7.2 Konsep Stratifikasi Sosial.

Stratifikasi merupakan suatu hal yang disebabkan oleh adanya penghargaan dalam masyarakat seseorang yang memiliki sesuatu yang dihargai dalam struktur masyarakat dalam jumlah yang banyak akan memperoleh kedudukan yang tinggi di masyarakat tersebut dibandingkan dengan orang yang hanya memiliki sedikit sesuatu yang dihargai tersebut. Misalnya saja dalam suatu masyarakat yang menjunjung tinggi pengetahuan tentang agama, mereka akan menghormati dan menempatkan posisi yang tinggi bagi mereka yang memiliki pengetahuan agama dengan baik. Demikian pula halnya dengan masyarakat yang memuja pemilikan benda yang menempatkan posisi yang tinggi bagi mereka yang memiliki harta benda yang banyak dalam posisi lapis atas dan selanjutnya disesuaikan dengan ukuran harta benda.

Menurut Kingsley David dan Wibert Moore dalam Salim (2006) menjelaskan bahwa stratifikasi sosial tak ada masyarakat yang tidak berstratifikasi atau sama sekali tidak berkelas. Disisi lain, mereka memandang bahwa system stratifikasi tidak mengacu kepada individu didalam sistem stratifikasi, tetapi lebih kepada sistem posisi (kedudukan).

Rizer dan Goodman dalam Salim (2006) menyatakan penempatan lapisan sosial dalam masyarakat menjadi masalah karena tiga alasan

mendasar. *Pertama*, posisi tertentu lebih menyenangkan untuk diduduki ketimbang posisi yang lain. *Kedua* posisi tertentu lebih penting untuk menjaga kelangsungan hidup masyarakat ketimbang posisi yang lain. Ketiga, posisi-posisi sosial yang berbeda menemukan bakat dan kemampuan yang berbeda pula.

Semakin maju suatu masyarakat, semakin kompleks pula pelapisan masyarakatnya. Pada masyarakat yang bersahaja perbedaan kedudukan dan peranan bersifat minim karena jumlah warganya sedikit dan orang yang dianggap tinggi kedudukannya juga sedikit baik macam maupun jumlahnya. Sedang dalam masyarakat yang kompleks perbedaan kedudukan dan peranan juga bersifat kompleks karena banyaknya orang dan berbagai ukuran yang dapat diterapkan.

Dalam sejarah bermula dari mitologi yang mengungkapkan ketidakmerataan status secara simbolis, serta memberi pembenaran bagi hubungan-hubungan dominasi-subordinasi yang terlibat didalamnya. Fungsi mitos ini secara jelas terlihat pada sejumlah masyarakat di Amerindian. Mitologi orang Winbago di Winconshin berhubungan dengan dua sisi belahan, yang satu Surgawi (pemilik kekuasaan upacara) yang lain duniawi (pemilik teknik-teknik yang niscaya bagi substansi material) saling bertarung, ketika bermulanya sang waktu untuk memperebutkan jabatan kepala suku. Bagi yang menangpun membangun dominasinya ; salah satu klan yang membentuk “ sisi belahan” ini, yakni burung Guntur (Thunder Bird), memiliki monopoli atas satuan kepala suku mereka. Organisasi

Bipartit Suku Winnebago dilandaskan atas ketidakmerataan status dan kekuasaan politik. Bagian atas adalah jenjang tertinggi, menempati bagian kanan dari wilayah kesukuan, dan klan-klan mereka mempergunakan burung-burung sebagai embelnya. Bagian dari bumi adalah inferior statusnya, menempati bagian kiri pada wilayah kesukuan dan kelas mereka mempergunakan hewan-hewan bumi sebagai embel totemnya. Mereka yang belakangan ini campur tangan dengan dunia politik secara tidak langsung, dalam melaksanakan misalnya fungsi kepolisian (klan beruang), fungsi badan kemasyarakatan para pemburu (klan Bison). Mereka tampak tetap diluar politik riil yang digariskan sesuai dengan rancangan yang supernatural.

Manusia yang beraneka ragam pada prinsipnya manusia bekerjasama dalam setiap transaksi sosial meskipun tidak sesuai dengan rencana, tetapi mereka selalu terorganisir. Kemampuan manusia dalam melaksanakan secara tepat karena manusia memiliki peersepsi yang sama terhadap sesuatu yang semestinya harus dilaksanakan situasi sosial tertentu. Pemahaman semacam ini dilakukan dalam adat dan hukum yang disebut hukum atau norma konvensional, dan totalitas norma-norma ini menimbulkan struktur sosial – pola tindakan yang mapan.

Secara umum tiga kriteria dasar dalam menganalisis stratifikasi masyarakat dalam tiga hal : yakni privilese, kekuasaan, prestise (Lihat Lawang, 2004) Dimensi pertama adalah Privilese, dalam dimensi ini orang dibedakan dari orang lain dilihat melalui banyaknya mereka

mengumpulkan sumber-sumber ekonomi, atau privilese. Dimensi kedua stratifikasi sosial adalah kekuasaan yakni kemampuan untuk mencapai tujuan dan sasaran, yang bahkan dapat bertentangan atau melawan suatu keadaan. Kekuasaan sangat erat hubungannya dengan kekayaan dan kekuasaan ekonomi, yang dapat menimbulkan kesempatan dalam memperoleh kekuasaan, terutama yang terjadi pada masyarakat barat. Namun demikian, kekayaan dan kekuasaan tidak selalu saling melengkapi. Pada negara-negara tertentu, kekuasaan berdasarkan pada faktor-faktor lain selain kekuasaan, seperti kepemilikan pengetahuan khusus atau kefasihan berpidato.

Dalam keadaan tersebut, kekuasaan karena kekayaan atau kepemilikan material dengan yang tidak memiliki, mungkin tidak berbeda secara signifikan. Kemudian Dimensi ketiga Stratifikasi sosial adalah prestise berupa penghargaan sosial, perhatian, atau kebanggaan yang masyarakat berikan kepada orang. Karena penilaian sosial yang diakui berdasarkan pada norma-norma dan nilai-nilai dari kelompok tertentu. Weber (1968) menjabarkan hubungan antara privilese, kekuasaan dan prestise memperlihatkan hubungan antar timbal balik. Dalam hubungan ini, prestise dalam bidang ekonomi merupakan pengaruh yang paling besar. Tetapi ketiga dimensi ini perlu dilihat secara terpisah. Setuju dengan pendapat Weber, sosiolog Mills (1956) menunjukkan hubungan antara ketiga Dimensi pada lapisan atas menghasilkan suatu elit kekuasaan yang saling terpadu dan mengembangkan gaya hidup dengan menekankan prestise tinggi, dan menduduki posisi penting

dalam bidang ekonomi. Mobilitas horizontal yang terjadi dalam lapisan yang sama diantara bidang kehidupan sosial, politik, dan ekonomi, juga terjadi pada kalangan elit sehingga kalangan elit merupakan kekuatan yang benar-benar menonjol dan terpisah dari kalangan bawah.

Lenski (1966) berbeda dengan pandangan Max Weber dan CW. Mills, mengenai hubungan antar dimensional, mengemukakan bahwa sebagian besar persebaran privilese dalam suatu masyarakat, kita harus menentukan persebaran kekuasaan. “ Dengan demikian dalam hubungan tersebut, jika sudah menentukan pola persebaran privilese, dan kalau sudah menemukan pula sebab-sebab terjadinya persebaran privilese yang berkaitan dengannya.

Dalam hubungan ini, tidak memperlihatkan kemungkinan pengaruh langsung dari privilese terhadap dimensi kekuasaan, kecuali melewati dimensi prestise secara tidak langsung Sedangkan antara alturisme dengan dimensi previlese terhadap hubungan satu arah, hubungan itu memperlihatkan pengaruh yang bersifat sekunder, karena kemungkinan terjadinya hubungan itu dalam kehidupan sosial sehari-hari sangatlah kecil. ada penjelasan dan juga perlu ada penjelasan dalam kehidupan masyarakat, perubahan sosial akan terjadi dalam waktu cepat atau lambat dan berpengaruh pada sistem distribusi ketiga dimensi stratifikasi sosial. Dengan kondisi seperti, maka saya mengacu pada teori interaksionalisme simbolik mengenai kenyataan sosial berkenaan dengan perubahan sosial budaya. Hal ini selaras dengan pandangan Schutz (1962) bahwa dalam memahami realitas sosial dalam berinteraksi, pikiran

dan stok pengetahuan seseorang sebagai dasar untuk mendefinisikan realitas sosial, dan sifat pengetahuan masing-masing kelompok berbeda. Karena para anggota memiliki pengetahuan bersama tentang realitas, sebagaimana adanya tersebut. Mereka juga dapat berasumsi bahwa dunia itu sudah ada, suatu tempat yang obyektif. Setelah itu, semua tahu realitas itu apa, dan apa yang terjadi didalamnya.

2.7.3 Stratifikasi Sosial masyarakat Orang Kutai

Dalam kehidupan sosial kemasyarakatan Kutai Kartanegara terlebih dahulu peneliti mengungkapkan pengertian dari istilah Primary dan secondary groups Menurut P.J. Bouman dalam bukunya Ilmu masyarakat umum menjelaskan bahwa, pengarang-pengarang Amerika (Cooley dll) lebih suka memakai istilah-istilah "Primary dan secondary" daripada *Gemeinschaft* dan *Gesellschaft*. Didalam golongan-golongan semacam ini berdasarkan pertalian-pertalian perseorangan. Dalam golongan primary terdapat suatu kerukunan yang tertentu sehingga saling kenal mengenal. Pada golongan yang primer dapat dilihat dengan jelas, adanya suatu dorongan yang ditujukan kepada mempertahankan ikatan golongan yang kokoh, sedikit banyaknya kekal dan bersedia melawan bilamana kehidupannya terancam penguatan perasaan bersatu. Sedangkan golongan bersifat sekunder terdapat kekuatan-kekuatan pengikat yang tidak berdasarkan pertalian perseorangan yang kuat. Disinilah mobilitasnya lebih besar dan keanggotaan golongan bersifat sukarela.

2.7.4. Gelar Kebangsawanan

Gelar kebangsawanan merupakan suatu penanda atau ikatan darah keturunan dan keraton berdasarkan posisi dalam tirahnya, atau bentuk penghargaan yang diberikan raja terhadap orang-orang yang telah berjasa ataupun memiliki kontribusi terhadap keraton. Gelar kebangsawanan adalah gelar yang diberikan kepada masyarakat keraton dan orang-orang luar keraton yang dianggap berjasa.

Kesultanan Kutai dalam kebangsawanannya sebagaimana dalam golongan primary dikenal penggunaan gelar sebagai berikut :

- a. Aji Sultan, yaitu gelar yang digunakan untuk penyebutan nama Sultan bagi kerabat kerajaan.
- b. Aji Ratu, yaitu gelar yang diberikan bagi permaisuri Sultan
- c. Aji Pangeran, yaitu gelar bagi putri Sultan.
- d. Aji Putri, yaitu gelar bagi putri Sultan
- e. Aji Raden, yaitu gelar yang setingkat diatas Aji Bambang.
- f. Aji Bambang, yaitu gelar yang setingkat lebih tinggi dari Aji.
- g. Aji Sayyid, yaitu gelar yang diturunkan kepada putra dari wanita Aji yang menikah dengan pria keturunan Arab.
- h. Aji Syarifah, yaitu gelar yang diturunkan kepada putri dari wanita Aji yang menikah dengan pria keturunan Arab. (Lisda Sofia dkk : 4 : 2017).

Dalam kehidupan masyarakat Kutai termasuk dalam golongan primary yang terdiri dari 3 golongan. *Pertama* golongan Bangsawan lapisan atas dengan menggunakan tambahan didepan namanya disebut Aji.

Kedua Golongan tengah lapisan tengah yakni golongan yang masih dekat hubungan dengan bangsawan golongan ini menggunakan nama Awang atau Encik . *Ketiga* Golongan bawah adalah golongan rakyat biasa. Masyarakat yang tradisional dijumpai pula pimpinan yang tradisional, berdasarkan kepercayaan dan kebiasaan serta kepatuhan kepada pimpinan yang turun temurun. Dalam hal ini hanya dua golongan di atas yang dominan berpengaruh pada masyarakat. Daerah Kutai Kartanegara yang awalnya merupakan daerah kerajaan dibawah pengaruh kebudayaan Hindu, hingga pengaruh Islam yang berkuasa bahkan sampai pada perubahan dari kerajaan menjadi kedaulatan RI, telah turun temurun berkuasa, Maka aspek-aspek tradisional masih tetap mempengaruhi kehidupan masyarakat Kutai. Perkembangan birokrasi kesultanan berlangsung secara evolusi dan sangat statis sejak berpuluh puluh tahun. Hal ini disebabkan karena yang diutamakan adalah kesejahteraan masyarakat lapisan atas saja sedang rakyat tetap statis. Kehidupan penduduk rata-rata sebagai petani, nelayan pedagang-pedagang kecil tukang kayu dan sebagai buruh. Sedangkan golongan kedua tersebut menduduki peranan dalam pemerintahan.

1. Sosial

Kehidupan sosial yang statis ini membawa pengaruh terhadap jalannya birokrasi kesultanan. Misalnya, cara-cara kerja kaum birokrat sangat lamban. Kehidupan sosial yang statis disebabkan oleh pemerintah yang tidak memberikan kebebasan pada penduduknya untuk leluasa bergerak dalam arti berusaha. Tata ikatan masyarakat tersebut

mempunyai pengaruh yang sangat besar terhadap kebudayaan, tata perekonomian, tata hukum dan otomatis akan menuntut adanya system pemerintahan yang berbeda. Dengan adanya kesadaran akan keterbelakangan masyarakat, mulailah mengoreksi diri dengan melakukan perubahan pada struktur masyarakat yang memiliki norma-norma dan nilai-nilai hidup. Untuk meningkatkan sumber daya manusia, maka dibutuhkan lembaga pendidikan baik sekolah maupun sekolah kejuruan yang dapat mempercepat proses perubahan dalam masyarakat terutama dalam nilai-nilai sosial. Dan perkembangan tersebut membawa pengaruh terhadap administrasi pemerintah daerah yang dapat menyesuaikan diri dengan tuntutan-tuntutan masyarakatnya yang semakin meningkat. Pengaruh kemasyarakatan disebabkan oleh adanya nilai-nilai dan norma-norma sosial, aspirasi-aspirasi politiknya, oleh keinginan keinginan dan tuntutan tuntutan adalah aktivitas dan aspirasi-aspirasi politik lokal yang hidup dalam masyarakat seperti DPRD yang merupakan lembaga perwakilan harus memperhatikan aspirasi masyarakat. Namun masyarakat yang serba kompleks biasanya tidak menghendaki pejabat administrasi daerah yang terlalu banyak mencampuri urusan mereka.

Masyarakat Kutai Kartanegara sebagian besar hidup di Desa dengan bertani, dan sebagian lagi hidup di kota yang sudah mengalami kemajuan ketahap yang lebih tinggi. Perkembangan ini bersifat menyeluruh, meliputi bidang ekonomi, kebudayaan dan politik. Namun harus didasari pula bahwa dengan adanya administrasi pemerintahan

daerah yang baik akan memberikan pelayanan yang cepat dengan menegakkan keadilan dan hak-hak azasi manusia. Apalagi masyarakat Kutai tidaklah homogen, mereka terdiri dari penduduk asli dan pendatang yang dalam setiap segi penghidupannya maupun dari segi kebudayaannya. Sehingga mereka harus diperkenalkan dengan keadaan-keadaan yang baru, kebutuhan-kebutuhan baru yang lebih baik dari keadaan sebelumnya.

2 . Politik

Politik berarti mempersoalkan segala sesuatu yang berhubungan dengan kekuasaan, pemerintahan lembaga dan proses politik, hubungan internasional dan pemerintahan daripada manusia. (Djaeni Slamet Widodo ; 1995 :49)

Menurut M.Shaleh Putuhena, jika politik dipandang sebagai system kekuasaan maka kehidupan politik dapat diklafikasikan dalam tiga hal pokok yaitu *pertama* Sumber kekuasaan *kedua* Distribusi kekuasaan *ketiga* Pelaksanaan kekuasaan (M. Saleh Putehena ;2007 : 258).

Sejak kerajaan Islam di Kutai Kartanegara Sultan dibantu oleh ulama sebagai penasehatnya dengan menggunakan agama sebagai pusat pembelajaran di istana juga untuk memperkuat diri dalam menghadapi kerajaan non Islam, terutama dalam hal politik, ekonomi dan agama. Hal ini terlihat bagaimana sultan-sultan mengadakan perjanjian kerjasama dengan kerajaan kerajaan lokal lainnya.

Apabila politik dikaitkan dengan power (power relationship), maka politik mempunyai unsur kekuatan (force) secara formil setiap negara pada hakekatnya adalah bangunan kekuasaan yang tertinggi di dunia. Oleh karena itu dapat memaksakan kehendaknya baik kedalam maupun keluar. Secara birokrasi kesultanan tersentralisir pada sultan sebagai pemimpin. Power yang dimilikinya tidak ada yang mengimbangnya, sehingga bersifat absolut. Sekalipun power yang dimiliki sultan itu sifatnya yang absolut dan logis bertindak sewenang-wenang, akan tetapi sultan tidak melakukannya, disebabkan masih terkait dengan upacara adat dan ritual, yang berarti apabila dilakukan tindakan sewenang-wenang tersebut, maka ia berbuat suatu pelanggaran (pantangan) sehingga memungkinkan terganggunya situasi dalam lingkungan birokrasi kesultanan dan dapat berpengaruh pada kehidupan masyarakat.

Adapun pengaruh luasnya birokrasi kesultanan terutama para pejabatnya maka dalam prakteknya bahwa apabila ada sesuatu perintah yang disampaikan, haruslah perintah itu segera dilaksanakan, para pejabat harus ada tanggapan positif untuk segera menyelesaikan intruksi tersebut.

Betapa besar pengaruhnya sultan dalam birokrasinya, sehingga dengan pengaruh itu para pejabat lebih mengutamakan disiplin kerja yang tinggi. Demikian pula pengaruhnya terhadap rakyat yang tersebar didaerah-daerah, dengan melalui kepala-kepala distrik dan petinggi-petinggi maka rakyat pun tunduk dan taat melaksanakannya. Sistem

penyampaian perintah ke daerah-daerah biasanya dengan system beranting. Oleh karena itu pejabat-pejabat birokrasi kesultanan memperoleh authority dari sultan dan dalam kehidupan birokrasi itu adanya pengutamaan terhadap pemeliharaan atas tanggung jawab supaya mendapat penghormatan dari rakyat sebagaimana rakyat memberi penghormatan kepada pimpinan birokrasi kesultanan.

3 .Ekonomi Pertanian dan perdagangan

Kemajuan suatu kerajaan atau negara maka kita harus memperhatikan tingkat hidup rakyat itu sendiri, dari segi kesehatan, pendidikan, jaringan komunikasi, dan lalu lintas perdagangan. Tingakat kehidupan rakyat berhubungan erat dengan kemajuan perokonomian. Aarsten Van J,P, (1953). Begitu pula pertanian adalah dipergunakanya kegiatan manusia yang ditujukan untuk memperoleh hasil dari tumbuh-tumbuhan atau hewan, hal yang dicapai dengan jalan sengaja menyempurnakan segala kemungkinan yang diberikan alam untuk mengembangbiakan tumbuh-tumbuhan maupun hewan.

Dalam hal ini tidak dapat dipisahkan dari pertanian. Merupakan lanjutan daripada usaha pertanian Cara pertanian didaerah ini masih sangat sederhana yaitu dengan mempergunakan perladangan dengan sedikit mempergunakan sawah yang pengolahannya hanya sekali dalam setahun. Demikian pula hasil yang dijual dan hasil yang dibeli haruslah diangkut, Hal ini sudah jelas mengenai pada sistem pertukaran yang merupakan aktivis pertanian. Oleh karena itu kita tidak boleh mengabaikan perdagangan, pengangkutan, dan konsumsi hasil-

hasilnya, semuanya mempunyai arti penting bagi pertanian. Lebih-lebih lagi bahwa pertanian adalah salahsatu bentuk dari bermacam-macam aktivitas perekonomian. Jelaslah bahwa ekonomi pertanian adalah merupakan dasar dari kehidupan manusia.